



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**KECAMATAN MATANGGA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Matangnga Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan LAKIP ini merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran program dan kegiatan Kecamatan Matangnga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

LAKIP ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Matangnga, 13 Januari 2026

CAMAT MATANGNGA



ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19740819 200801 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Matangnga Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Kecamatan Matangnga Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan "Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas" dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sasaran yang diukur untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP.
- Program yang mendukung sasaran demi mewujudkan tujuan " Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas" antara lain :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Target capaian indikator kinerja, IKM 83,50,% dan capaian realisasi 82,25% sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,50% atau bermakna Sangat Baik.
- Target capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan tahun 2025 hasil **evaluasi mandiri** yaitu 62,00 dengan realisasi sebesar 60,00 (Predikat B) sehingga capaian kinerja sebesar 96,77 % atau bermakna Baik.
- Realisasi anggaran Kecamatan Matangnga mencapai 93,72% dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.793.353.848,- dan realisasi anggaran Rp.1.680.783.963,- dengan efisiensi sebesar 6,27%.
- Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, sebagaimana analisis pencapaian indikator sasaran disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Matangnga tahun 2025 adalah Baik.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 didukung dengan adanya kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan, para pemangku kepentingan baik di Pemerintahan Kecamatan Matangnga, maupun pemerintah daerah serta dukungan/ partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa tantangan/hambatan yang perlu mendapat perhatian/solusi, yaitu antara lain :

A. Tantangan / hambatan:

- Keinginan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang lebih prima
- Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah pemerintahan kecamatan
- Tidak Semua SDM apratur memiliki kemampuan dibidang IT
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan
- Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja melayani

B. Solusi:

- Membangun system pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan,
- Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan lainnya;
- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman terhadap prosedur pelayanan yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	16
C. Instrumen Pendukung Tahun 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	22
A. Akuntabilitas Kinerja.....	22
B. Akuntabilitas Keuangan.....	46
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	6
Tabel 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	6
Tabel 1.4	Data Sarana dan Prasarana Tahun 2025	7
Tabel 1.5	Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Matangnga	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Matangnga Tahun 2025-2029	15
Tabel 2.2	IKU Kecamatan Matangnga Tahun 2025	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Matangnga Tahun 2025	17
Tabel 2.4	Program dan Alokasi Anggaran Kecamatan Matangnga Tahun 2025	18
Tabel 2.5	Program dan Alokasi Anggaran Kelurahan Matangnga Tahun 2025	19
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2025	22
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Matangnga Tahun 2025	23
Tabel 3.3	Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	24
Tabel 3.4	SKM Semester I pada Kecamatan Matangnga Tahun 2025	24
Tabel 3.5	SKM Semester II pada Kecamatan Matangnga Tahun 2025	25
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan tahun sebelumnya	28
Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
Tabel 3.8	Data Evaluasi Anggaran Program pada APBD Perubahan Tahun 2025	38
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	39
Tabel 3.10	Capaian Hasil Evaluasi SAKIP dari Tahun 2021 s/d 2024	39
Tabel 3.11	Data Indikator Predikat SAKIP Kecamatan Matangnga Tahun 2024 berdasarkan Review Penilaian SAKIP dari Inspektorat Di Tahun 2025	41
Tabel 3.12	Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi capaian Kinerja Sasaran Strategs 2	45
Tabel 3.13	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2025	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Kantor Kecamatan Matangnga	5
Gambar 2.1	Visi dan Misi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.....	14
Gambar 2.2	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	20
Gambar 2.3	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).....	21
Gambar 2.4	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD	21
Gambar 3.1	Musrenbang Desa Kecamatan Matangnga Tahun 2025	32
Gambar 3.2	Diskusi dan Edukasi Pelayanan Publik.....	33
Gambar 3.3	Kegiatan TP.PKK dan Peringatan HUT RI Tahun 2024.....	31
Gambar 3.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Matangnga	34
Gambar 3.5	Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat	35
Gambar 3.6	Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Kesehatan	36
Gambar 3.7	Rapat Evaluasi Kinerja Kecamatan Matangnga	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Tren Nilai SKM Kecamatan Matangnga.....	26
Grafik 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	29
Grafik 3.3	Data Evaluasi Anggaran Program pada APB Perubahan	38
Grafik 3.4	Perkembangan Implementasi SAKIP Tahun 2021-2024	40
Grafik 3.5	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	46

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Matangnga Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. Landasan Hukum

Dokumen LAKIP Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 2):
9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029:
10. Surat Keputusan Camat Matangnga Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Matangnga periode Tahun 2025-2029. Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 adalah :

2.1. Maksud Laporan

untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.2 Tujuan Laporan

Adapun tujuan dari penyusunan LAKIP Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Matangnga dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025;
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang;
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan;
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

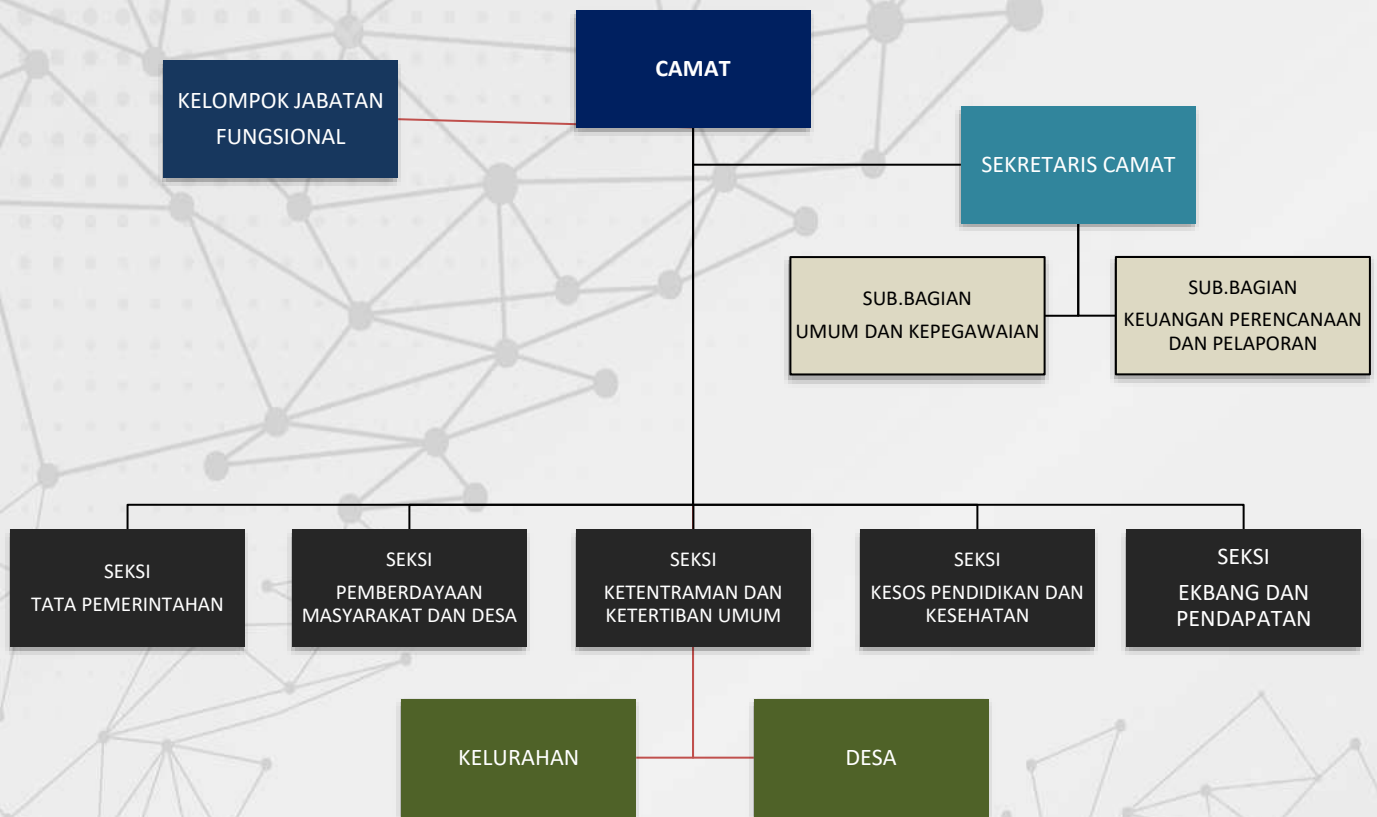
- a). Kecamatan merupakan unsur koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b.) Kecamatan Matangnga dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
 - Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja di dalam suatu organisasi. Struktur organisasi bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara membagi tugas dan tanggung jawab kepada individu-individu yang kompeten

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Matangnga adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 pada Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Matangnga



3. Sumber Daya Kecamatan Matangnga

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Matangnga terdiri dari 15 orang ASN, 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 29 orang Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya aparatur pada Kecamatan Matangnga :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan per Desember 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	-
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1

NO	JABATAN	JUMLAH
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan	1
9	Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pendapatan	1
10	Pengadministrasi Umum	4
11	Lurah	1
12	Sekretaris Lurah	1
13	Kepala Seksi Pemerintahan	-
14	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1
15	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	-

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Tahun 2025

NO	JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur Muda-5	1
2	Penata Layanan Operasional	Pengatur-7	1

Tabel 1.3
Jumlah ASN berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN	LK	P
1	Pembina	IV.a	3	-
2	Penata Tk.I	III.d	5	-
3	Penata	III.c	2	1
4	Penata Muda Tk.I	III.b	-	-
5	Penata Muda	III.a	1	-
6	Pengatur TK.I	II.d	-	-
7	Pengatur	II.c	1	-
8	Pengatur Muda Tk.I	II.b	2	-
9	Pengatur Muda	II.a	-	-

Berdasarkan Tabel diatas, meskipun kuantitas aparatur telah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) rutin Kecamatan Matangnga, namun sebaran kompetensi teknis belum merata. Mengingat luasnya cakupan wilayah pelayanan dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, diperlukan peningkatan kapasitas SDM yang lebih terfokus pada pelatihan teknis pelayanan publik (seperti pelayanan dokumen digital, penanganan pengaduan, dan manajemen kewilayahan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara maksimal.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama Kecamatan Matangnga saat ini bukan lagi pada jumlah (kuantitas), melainkan pada **kualitas dan distribusi keahlian** (kompetensi). Berikut adalah beberapa poin penguatan untuk mendukung argumen tersebut:

1) Adaptasi Digital

Pelatihan pelayanan dokumen digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mengejar target Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2) Responsivitas

Fokus pada penanganan pengaduan akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat secara langsung karena warga merasa keluhannya dikelola secara profesional. Pelatihan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) untuk merespons keluhan masyarakat dengan cepat dan akuntabel

3) Efektivitas Wilayah

Dengan manajemen kewilayahan yang baik, aparatur tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi mampu melakukan pemetaan masalah di lapangan secara akurat.

b. Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Organisasi

Dalam rangka menunjang optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan Matangnga, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor krusial yang mempengaruhi kecepatan, kenyamanan, dan akurasi layanan. Berikut adalah tabel sarana dan prasarana utama di Kantor Kecamatan Matangnga :

Tabel 1.4
Data Sarpras dan Analisis Keterkaitan Layanan Tahun 2025

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Barang	Kondisi	Analisis Keterkaitan dengan Kualitas Pelayanan
1	Prasarana Fisik Utama dan Pendukung			
	<ul style="list-style-type: none"> Gedung Kantor/Ruang Pelayanan Terpadu (PATEN) 	1 unit	Baik 80%	Renovasi Ruang tunggu representatif, meningkatkan kenyamanan warga sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unsur kenyamanan meningkat
	<ul style="list-style-type: none"> Musholla 	1 unit	Baik	Pengunjung/pengguna layanan dapat menjalankan ibadah shalat tepat waktu tanpa harus meninggalkan lokasi, sehingga waktu pelayanan lebih efisien
2	Sarana Pelayanan Khusus dan Aksesibilitas			
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Difabel (Ramp/Jalur Kursi Roda) 	1 Jalur	Baik	Fasilitas ini memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam menerima layanan, sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, sehingga meningkatkan nilai kepuasan pada unsur responsivitas petugas dan aksesibilitas
	<ul style="list-style-type: none"> Pojok Baca/Ruang Informasi 	1 unit	Baik	Mengubah waktu tunggu yang membosankan menjadi kegiatan yang produktif dan informatif
	<ul style="list-style-type: none"> Parkiran 	1 unit	Baik	aksesibilitas, kenyamanan, dan ketertiban
3	Sarana Teknis dan Informasi (Teknologi)			
	<ul style="list-style-type: none"> Koneksi Internet/Jaringan LAN 	1 unit	Baik	BAKTI AKSI (Akses Internet) merupakan program pemerintah melalui BAKTI Komdigi untuk menyediakan akses WiFi gratis di titik layanan publik
	<ul style="list-style-type: none"> Komputer / Laptop Pelayanan 	3 unit	2 Baik, 1 Sedang	Peningkatan Efisiensi dan Kecepatan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> Scanner & Printer 	2	Baik	Peningkatan Efisiensi dan Kecepatan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> Penunjuk Arah & Papan Informasi 			Mempercepat alur pelayanan, mengurangi antrean panjang, dan meminimalkan waktu yang terbuang karena tersesat atau salah mencari ruangan/unit layanan
4	Inventaris Kantor Penunjang			
	<ul style="list-style-type: none"> Meja dan Kursi Pelayanan 	3 Meja 10 Kursi	Baik	Kursi tunggu yang nyaman dan meja pelayanan yang bersih menciptakan kesan pertama yang positif, mengurangi tingkat stres masyarakat saat antre atau berurusan

• Lemari Arsip/Rak Dokumen	2	Baik	Lemari arsip yang tertata memungkinkan pegawai menemukan dokumen atau data masyarakat dengan cepat. Ini mengurangi waktu tunggu masyarakat dalam pengurusan surat, izin, atau berkas penting lainnya.
• AC/Kipas Angin	2	Baik	Ruangan yang sejuk dan nyaman membuat masyarakat yang menunggu atau mengurus dokumen merasa lebih sabar dan tidak emosional, meningkatkan persepsi positif terhadap kualitas pelayanan
• Televisi	1	Baik	Mengurangi Rasa Bosan dan Kecemasan dalam menunggu antrian
• Kendaraan Operasional (Motor)	2 unit	1 Baik, 1 Rusak	Peninjauan lokasi/pelayanan jemput bola ke desa maksimal. sasaran cakupan pelayanan administrasi di desa terpencil mencapai 95%.

Analisis Keterkaitan Sarpras dengan Pelayanan Publik Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa:

- 1) Peningkatan Sarpras Fisik Berbanding Lurus dengan IKM
Renovasi ruang PATEN dan perbaikan fasilitas difabel secara langsung meningkatkan skor IKM terkait sarana prasarana karena warga merasa lebih nyaman dan dihargai.
- 2) Kebutuhan Jaringan Internet
Berbeda dengan BAKTI AKSI yang biasanya terpusat di satu titik (seperti : sekolah, puskesmas, kantor desa). Kecamatan Matangnga membutuhkan Layanan dari operator swasta umumnya, kecepatan yang lebih tinggi dan mobilitas yang lebih fleksibel dibandingkan titik WiFi statis BAKTI AKSI menjadi bottleneck (hambatan) pada kecepatan pelayanan teknis. Rasio jumlah perangkat dengan ketersediaan bandwidth internet yang ada saat ini sering menyebabkan sistem down pada jam sibuk (pukul 10.00 - 14.00). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan menjadi faktor penentu utama dalam menjaga kontinuitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
- 3) Dampak Jangka Panjang
Dengan diperbaikinya kendaraan operasional, pelayanan menjadi lebih proaktif (jemput bola), yang meningkatkan cakupan jangkauan pelayanan publik hingga ke pelosok kecamatan.

5. Isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Matangnga adalah sebagai berikut :

a) Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan PATEN namun masih mengalami beberapa perubahan terkait kebijakan yang di terapkan dalam pelaksanaan hingga sekarang. Itulah perwujudan terkait Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

b) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelurahan dan Desa melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Kelurahan dan desa antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan masyarakat kapasitas masyarakat/kelompok dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c) Pembangunan Kewilayaan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perbup pelimpahan kewenangan serta aspirasi dari masyarakat yang akan tertuang dalam musrembang desa yang di sampaikan kepada kecamatan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

d) Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Matangnga. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat.

e) Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Memang tidak

semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya. Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah terhadap permasalahan pelayanan perangkat daerah, maka dapatlah diformulasikan isu strategis Renstra Kecamatan Matangnga Tahun 2025-2029 pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Matangnga

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN	PERMSALAHAN KECAMATAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN			ISU STRATEGIS KECAMATAN
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tersedianya potensi sosial dalam pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Sustainable Development Goals (SDGs)	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Kemiskinan Ekstrim dan Stunting	Pelayanan terhadap masyarakat
					Pemberdayaan Desa/Kelurahan

6. Ruang Lingkup Penyusunan LAKIP

Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 meliputi seluruh proses pertanggungjawaban kinerja tahunan, mulai dari reviu perencanaan strategis (Renstra), pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU), realisasi anggaran, hingga penyajian laporan naratif yang dibandingkan dengan perjanjian kinerja. LAKIP mencakup evaluasi sistem, output, outcome, dan dampak kegiatan.

7. Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025 Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah (APBD Pokok) Tahun 2025 sebesar Rp.2.300.840.141,- dengan rincian jumlah Belanja Operasi Rp.2.061.955.141,- dan Belanja Modal sebesar Rp.238.885.000.- sedangkan Total Anggaran Belanja Daerah (Setelah Perubahan) Tahun 2025 sebesar Rp.1.793.353.848,- dengan rincian jumlah Belanja Operasi Rp.1.620.603.848,- dan Belanja Modal sebesar Rp.172.750.000.-

8. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 Kantor Kecamatan Matangnga Tahun 2025 ini terdiri dari empat (4) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, kondisi organisasi, ruang lingkup, anggaran dan sistematika penyusunan LAKIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat tentang rencana strategis, indikator kinerja utama dan rencana kinerja tahunan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Memuat tentang pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan realisasi.

Bab IV Penutup

Memuat tentang kesimpulan dan saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Renstra Kecamatan Matangnga ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun, Visi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 adalah :

“ POLEWALI MANDAR SEHAT, CERDAS DAN MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029. Dari Visi dan 7 (tujuh) Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, visi yang relevan dengan Kecamatan Matangnga adalah pada misi ke 1 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government)”**.

Gambar 2.1
Visi Misi Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2025-2029



1) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Kecamatan Matangnga Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”**

2) Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) perangkat daerah. Adapun sasaran Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Matangnga Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA SASARAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	82,50	83,50	85,25	86,00	87,25	88,30	90,00
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	85,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	CC (59,20)	B (62,00)	B (65,50)	B (70,00)	BB (73,50)	BB (75,25)	BB (80,00)

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C, yaitu : specific (jelas), measureable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (sesuai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan continuously

improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran merupakan indikator dilevel impact (dampak). Indikator sasaran strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Matangnga Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	Hasil konversi dikategorikan sebagai berikut: 1,00 - 1,75 (25 - 43,75) : D - Sangat tidak baik 1,76 - 2,50 (43,76 - 62,50) : C - Tidak baik 2,51 - 3,25 (62,51 - 81,25) : B - Baik 3,26 - 4,00 (81,26 - 100,00) : A - Sangat baik
2	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	Interval Nilai Realisasi Kinerja 91 > : Sangat Tinggi 76 - 90 > : Tinggi 66 < 75 : Sedang 51 < 65 : Rendah < 50 : Sangat Rendah
3	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Hasil Review Inspektorat atas Implementasi SAKIP, yaitu : AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan A > 80 - 90 : Memuaskan BB > 70 - 80 : Sangat baik B > 60 - 70 : Baik CC > 50 - 60 : Cukup C > 30 - 50 : Kurang D > 0 - 30 : Sangat Kurang Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 12 Tahun 2015

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Penetapan kinerja tersebut merupakan tekad dan janji antara Pimpinan Instansi unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja.

Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah terhadap atasan langsungnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, namun kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya demi terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahun. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan kinerja Kecamatan Matangnga Tahun 2025 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Matangnga dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Kecamatan Matangnga Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Matangnga Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90,00 (Baik)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	62,00 (Baik)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.003.489.141,-	DAU, PAD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 97.351.000,-	DAU
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 200.000.000,-	DAU Tambahan
JUMLAH		Rp. 2.300.840.141,-	

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025, Kecamatan Matangnga mendapat dukungan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.793.353.848,- anggaran tersebut direalisasikan ke seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 3 program, 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Tabel 2.4
Program dan Alokasi Anggaran Kecamatan Matangnga Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.846.023.941	1.417.267.778	(428.756.163)
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.330.000	2.200.000	(3.130.000)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.095.000	515.000	(580.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.125.000	755.000	(1.370.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.035.000	415.000	(620.000)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.075.000	515.000	(560.000)
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.614.234.041	1.279.318.578	(334.915.463)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.612.993.841	1.278.618.578	(334.375.263)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.240.200	700.000	(540.200)
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.085.000	24.102.800	(53.982.200)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.545.000	595.000	(950.000)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.450.000	5.625.000	(3.825.000)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.425.000	3.700.000	(1.725.000)
	Penyediaan Bahan/Material	7.000.000	5.819.000	(1.181.000)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.665.000	8.363.800	(46.301.200)
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.869.000	0	(40.869.000)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.869.000	0	(40.869.000)
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.200.900	87.231.900	10.031.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.619.000	850.000	(1.769.000)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.781.900	3.781.900	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.800.000	82.600.000	11.800.000

1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.305.000	24.414.500	(5.890.500)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.132.000	22.994.500	(2.317.500)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.333.000	0	(2.333.000)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.840.000	1.420.000	(1.420.000)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	97.351.000	51.346.000	(46.005.000)
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.356.000	51.346.000	(45.010.000)
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.700.000	0	(9.700.000)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86.656.000	51.346.000	(35.310.000)
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	995.000	0	(995.000)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	995.000	0	(995.000)
	TOTAL ANGGARAN KECAMATAN	1.943.374.941	1.468.613.778	(474.761.163)

Tabel 2.5
Program dan Alokasi Anggaran Kelurahan Matangnga Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.465.200	123.240.070	(34.225.130)
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.059.800	0	(2.059.800)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	878.000	0	(878.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.181.800	0	(1.181.800)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.616.200	11.890.000	(21.726.200)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.120.000	4.770.000	(1.350.000)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.276.000	1.363.000	(913.000)
	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000	4.087.000	(913.000)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.220.200	1.670.000	(18.550.200)

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.266.000	0	(25.266.000)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.266.000	0	(25.266.000)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.291.200	92.291.200	13.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.291.200	1.291.200	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000	91.000.000	13.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.232.000	19.058.870	1.826.870
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.232.000	19.058.870	1.826.870
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	201.500.000	1.500.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000	201.500.000	1.500.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	27.250.000	28.750.000	1.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	172.750.000	172.750.000	0
	TOTAL ANGGARAN KELURAHAN	357.465.200	324.740.070	(32.725.130)

C. INSTRUMEN PENDUKUNG TAHUN 2025

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Kecamatan Matangnga didukung oleh beberapa instrumen diantaranya :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

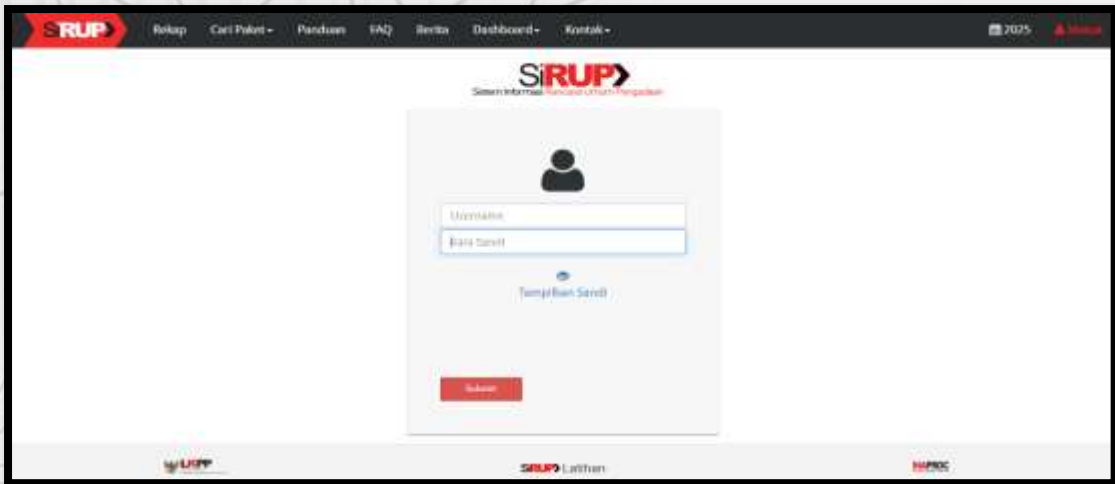
Gambar 2.2
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



2. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) adalah suatu aplikasi yang berguna untuk mengidentifikasi barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa dan anggaran pengadaan.

Gambar 2.3
Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)



Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

Gambar 2.4
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Barang Milik Daerah (BMD)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

1) Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Matangnga selama tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Matangnga tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Kecamatan Matangnga tahun 2025. Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas</i>	<i>Indeks kepuasan masyarakat</i>	<i>Angka</i>	83,50	82,25	98,50
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	90,00	93,72	104,13
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	62,00	60,00	96,77
Rata-Rata Capaian					99,80

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Matangnga tahun 2025 adalah sebesar 99,80%.

2) Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Analisis kinerja Kecamatan Matangnga pada tahun 2025 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utam (IKU) Tahun 2025. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas</i>	<i>Indeks kepuasan masyarakat</i>	<i>Angka</i>	<i>83,50</i>	<i>82,25</i>	<i>98,50</i>

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.

Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi- inovasi pelayanan publik.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	83,50	82,25	98,50

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target IKM Kecamatan Matangnga pada tahun 2025 sebesar 83,50 sementara realisasi mencapai 82,25, maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang sebesar 98,50 persen, maka capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Tahun 2025 **tidak dapat mencapai target**.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kecamatan Matangnga, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Matangnga Tahun 2025 terhadap 5 jenis layanan publik di lingkungan Kecamatan Matangnga. Untuk melihat Nilai Rata-Rata pada hasil survey kepuasan masyarakat Tahun 2025 berdasarkan Nilai Unsur Pelayanan pada Kecamatan Matangnga yang dihitung dengan formulasi.

$$\frac{\text{Nilai IKM Semester 1} + \text{Nilai IKM Semester 2}}{2} = \text{Nilai Rata-Rata}$$

Nilai Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
SKM Semester 1 pada Kecamatan Matangnga Tahun 2025

Nilai Unsur Pelayanan										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Nilai Rata Rata (NRR)	3.333	3.233	3.266	3.566	3.233	3.433	3.233	3.266	3.233	
IKM per unsur/ NRR	0,366	0,356	0,359	0,392	0,356	0,378	0,356	0,359	0,356	3,278 x 25
IKM Unit Pelayanan	81,95									

Tabel 3.5
SKM Semester 2 pada Kecamatan Matangnga Tahun 2025

Nilai Unsur Pelayanan										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Nilai Rata Rata (NRR)	3.270	3.217	3.188	3.862	3.188	3.404	3.243	3.162	3.486	
IKM per unsur/ NRR	0,360	0,353	0,350	0,424	0,350	0,375	0,357	0,348	0,385	3.302 x 25
IKM Unit Pelayanan	82,55									

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai rata-rata IKM Unit Layanan pada Semester 1 dan Semester 2, dapat disimpulkan bahwa hasil IKM pada Tahun 2025 Penilaian Semester 1 dan 2 Tahun 2025 diperoleh Nilai IKM Semester 1 sebesar 81,95 dan Semester 2 Tahun 2025 dengan nilai sebesar 82,55 dengan kategori **B (Baik)**, sehingga total nilai rata-rata IKM yang diperoleh Kecamatan Matangnga pada Tahun 2025 sebesar 82,25 dari perhitungan dengan rumus :

$$\frac{81,95 + 82,55}{2} = 82,25$$

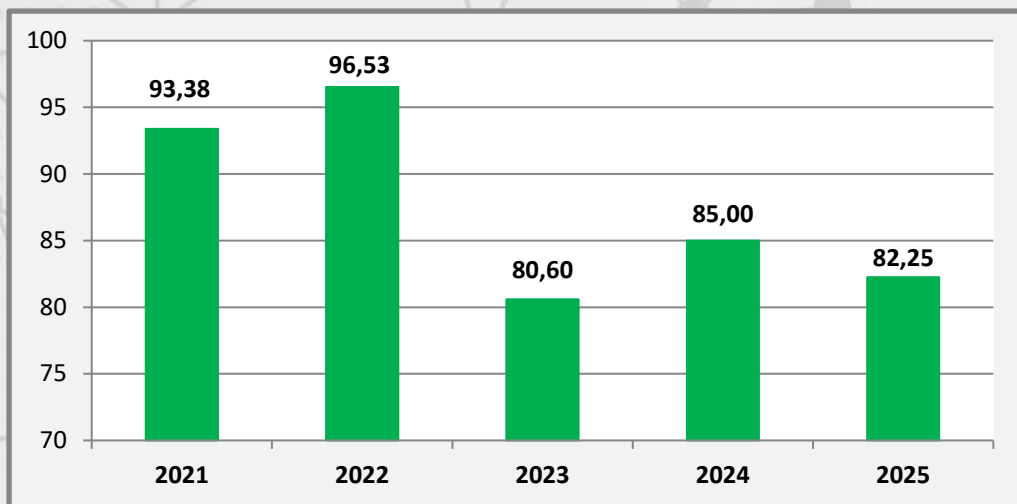
Adapun faktor tingginya beberapa indikator pada Survey Kepuasan Masyarakat di Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pelayanan prima yang diberikan oleh petugas pelayanan kepada masyarakat turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai IKM pada tahun ini sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik;
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada Tahun 2026 akan dilakukan perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Matangnga.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Tahun Sebelumnya

Pada grafik dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tujuan ***Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas*** yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2025 dengan tahun -tahun sebelumnya :

Grafik 3.1
Tren Nilai SKM Kantor Kecamatan Matangnga



c. Analisis Keberhasilan / Kegagalan serta Solusi yang dilakukan

Dengan melihat indikator pada tahun 2025 maka tidak dapat melebihi target, berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Matangnga di tahun 2025 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 yang dapat terlihat dari Indikator Kegiatan Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat dimana pada tahun 2024 telah melampaui target akan tetapi pada tahun 2025 ini tidak dapat melampaui target, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Matangnga dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu Sarana dan Prasarana, Waktu Penyelesaian dan Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan di Kecamatan Matangnga yang masih harus ditingkatkan agar memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Maka dari itu pada tahun 2026 ini perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan di Kecamatan Matangnga menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan dan diusulkan didalam Musrenbang pada Tahun Anggaran selanjutnya, pada point Waktu Penyelesaian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi yang massif kepada masyarakat perihal registrasi online yang dapat memangkas waktu pelayanan serta respons cepat setiap pelayanan yang masuk perlunya ketelitian dalam memeriksa keabsahan dokumen dan pada point Sistem, Mekanisme dan Prosedur untuk mensosialisasikan perubahan system, mekanisme dan prosedur pelayanan public melalui media social, website, banner dan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat agar dapat meningkatkan

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2026 serta pada point Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap media sosial agar segala aduan, saran dan masukan langsung dapat ditindak lanjuti.

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra maka Kecamatan Matangnga harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Matangnga untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- b. Melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan agar masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
- c. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- d. Melakukan pembinaan pelayanan terhadap aparatur tentang perubahan mindset (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) serta meningkatkan kapabilitas petugas Front Office melalui kegiatan Pendidikan Formal dan Non Formal.

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan

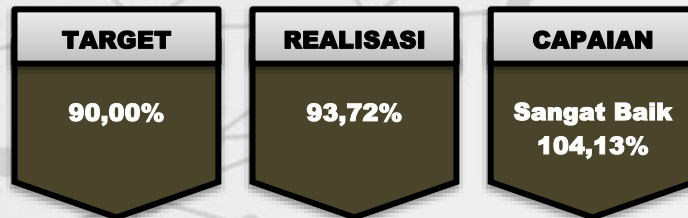
Indikator : Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan

Target : B (90,00)

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kecamatan Matangnga melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Matangnga Tahun 2025.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan yang diukur dengan Persentase Capaian Kinerja Kecamatan berada pada kategori “Sangat Baik” atau memenuhi target.



Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa terdapat peningkatan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Matangnga, dengan capaian mencapai 104,13% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan lebih optimal, didukung oleh peningkatan kinerja aparatur, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

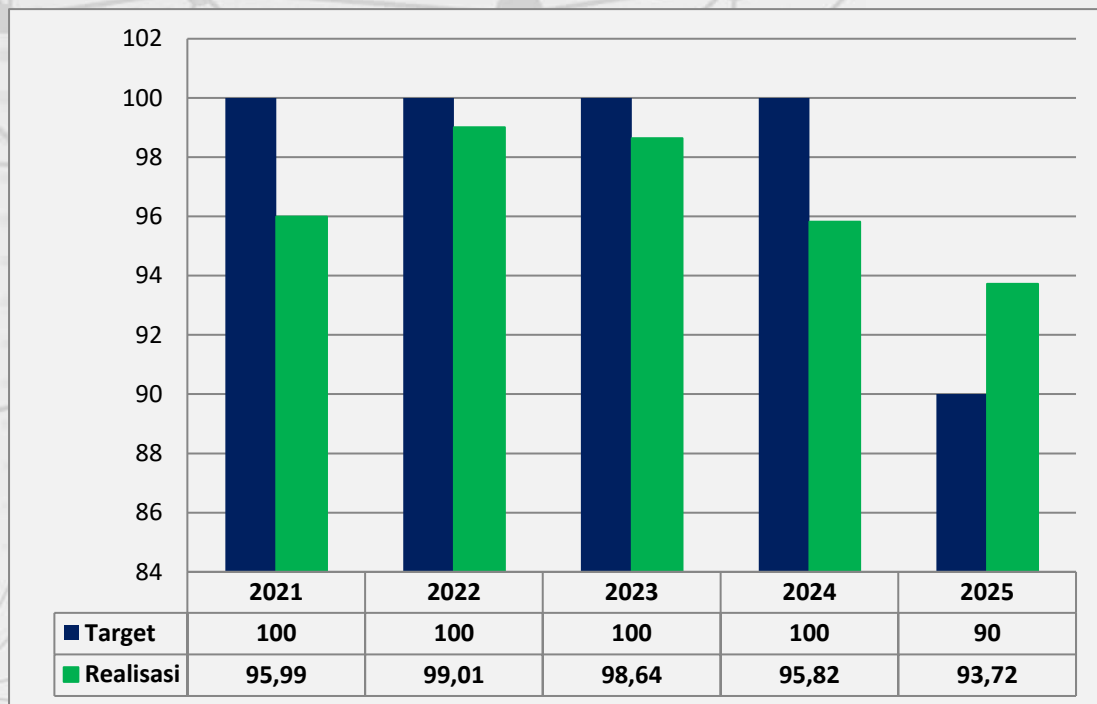
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Tahun Sebelumnya

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	95,99	99,01	98,64	95,82	93,72

Realisasi Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan realisasi sebesar 93,72% atau rata-rata 104,13%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 90% serta melebihi target Renstra tahun 2025. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas.

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Tahun Sebelumnya



Berdasarkan perbandingan capaian kinerja dan realisasi keuangan, diketahui bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Beberapa program menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, di mana realisasi kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi keuangan yang digunakan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan optimal, didukung oleh peningkatan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, pemanfaatan anggaran yang lebih efisien, serta sistem perencanaan dan evaluasi yang semakin baik. Efisiensi ini menjadi indikator bahwa proses pelaksanaan program di lingkungan pemerintahan telah mampu menyesuaikan antara kebutuhan dan penggunaan anggaran secara lebih efektif.

c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Matangnga Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan
Sumber Daya Untuk Indikator Sasaran 1 Kecamatan Matangnga
Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (Rp)
		Rp	(%)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.417.267.778	1.314.022.963	92,72	100	7,27
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.200.000	2.200.000	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	515.000	515.000	100	100	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	755.000	755.000	100	100	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	415.000	415.000	100	100	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	515.000	515.000	100	100	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.279.318.578	1.184.172.963	92,56	100	7,44
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.278.618.578	1.183.472.963	92,56	100	7,44
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000	700.000	100	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.102.800	21.639.000	89,77	100	10,22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	595.000	595.000	100	100	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.625.000	5.625.000	100	100	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.700.000	3.700.000	100	100	0
Penyediaan Bahan/Material	5.819.000	5.819.000	100	100	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.363.800	5.900.000	70,54	100	29,45
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.231.900	81.671.000	93,62	100	6,37
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850.000	850.000	100	100	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.781.900	721.000	19,06	100	80,93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.600.000	80.100.000	96,97	100	3,02
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.414.500	24.340.000	99,69	100	0,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.994.500	22.920.000	99,67	100	0,32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.420.000	1.420.000	100	100	0

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.346.000	51.346.000	100	100	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.346.000	51.346.000	100	100	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.346.000	51.346.000	100	100	0
TOTAL ANGGARAN KECAMATAN	1.468.613.778	1.365.368.963	92,96	100	7,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	123.240.070	113.915.000	92,43	100	7,56
Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.890.000	11.625.000	97,77	100	2,22
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.770.000	4.770.000	100	100	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.363.000	1.098.000	80,55	100	19,44
Penyediaan Bahan/Material	4.087.000	4.087.000	100	100	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.670.000	1.670.000	100	100	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.291.200	91.000.000	98,60	100	1,39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.291.200	0	0	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.000.000	91.000.000	100	100	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.058.870	11.290.000	59,23	100	40,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.058.870	11.290.000	59,23	100	40,76
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.500.000	201.500.000	100	100	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	201.500.000	201.500.000	100	100	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	28.750.000	28.750.000	100	100	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	172.750.000	172.750.000	100	100	0
TOTAL ANGGARAN KELURAHAN	324.740.070	315.415.000	97,12	100	2,87
TOTAL PAGU	1.793.353.848	1.680.783.963	93,72	100	6,27

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 program, 7 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp. Rp.1.793.353.848 tingkat realisasi anggaran sebesar Rp.1.680.783.963 dengan persentase sebesar 93,72% dengan efisiensi anggaran sebesar 6,27%.

d. Analisis Keberhasilan / Kegagalan serta Solusi yang dilakukan

Secara umum semua program mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama yang diwujudkan dalam pernyataan kinerja. Untuk pencapaian sasaran strategis tidak hanya didukung oleh salah satu program saja namun kesemua program yang telah ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Kinerja Pelayanan Kecamatan. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan salah satunya adalah :

1. Partisipasi dan Komunikasi Masyarakat melalui Konsultasi Publik

• Musrenbang Desa

Musrenbang kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi dan klarifikasi berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang Kelurahan/Desa, program lintas Kelurahan/Desa serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Matangnga dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Dalam rangka mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat di Kecamatan Matangnga sebagai input dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan Tahun 2026.

Gambar 3.1
Musrenbang Desa Kecamatan Matangnga Tahun 2025



- **Diskusi dan dan Edukasi Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan mendorong terwujudnya Good Governance. Ombudsman sebagai salah satu lembaga pengawasan diharapkan akan tercipta sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah standar yang dijadikan ukuran mengacu pada konsep Good Governance, yakni sejauh mana penyelenggaraan pemerintah secara efisien dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai sasaran yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat menuju welfare society

Gambar 3.2
Diskusi dan Edukasi Pelayanan Publik

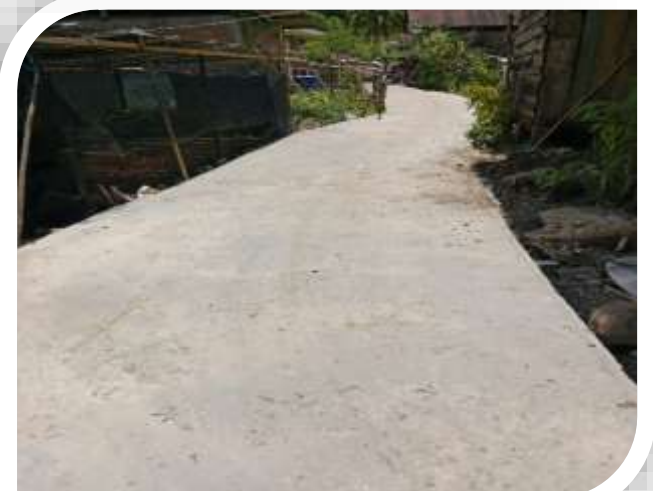


3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di Kelurahan Matangnga pada tahun 2025 adalah Perintisan Jalan Tani sepanjang ± 2.000 m di Lingkungan Posi dan di Lingkungan Sihuluang serta Pembangunan jalan Lingkungan (Rabat Beton) sepanjang ± 142 m di Lingkungan Makula dan di Lingkungan Matangnga Kelurahan Matangnga.

Gambar 3.4
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Matangnga
Tahun 2025



- **Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat**

Selain kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, Kelurahan Matangnga melaksanakan Kegiatan Pelatihan Kegiatan Pelatihan Budidaya Tanaman Durian dan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tanaman Kakao bagi kelompok masyarakat/petani.

Gambar 3.5
Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat



- **Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Kesehatan**

Pelaksanaan kegiatan PKK di 6 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Matangnga. Kegiatan PKK dimaksud yaitu : Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan, Memfasilitasi Program/Kegiatan PKK Desa/Kelurahan, dan Pendampingan kegiatan Posyandu di Desa/Kelurahan.

Gambar 3.6
Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Kesehatan
Tahun 2025



Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan antara lain :

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Jumlah pegawai yang terbatas, terutama yang memiliki keahlian teknis spesifik, tidak sebanding dengan beban kerja dan jumlah penduduk yang dilayani dan menguasai bidang pemerintahan desa, administrasi kependudukan, atau penggunaan aplikasi pelayanan berbasis IT.
- 2) Etos Kerja, Budaya kerja yang masih bersifat rutin, kurang inovatif, dan belum berorientasi sepenuhnya pada pelayanan prima (responsiveness).
- 3) Masalah Infrastruktur dan Teknologi Informasi (IT) sering terkendala jaringan internet yang tidak stabil.
- 4) Serapan Anggaran, hambatan dalam penyerapan anggaran yang tidak sesuai jadwal atau keterbatasan dana untuk meningkatkan sarana prasarana.
- 5) Lemahnya Pengawasan, Kurangnya monitoring dan evaluasi internal yang konsisten terhadap kinerja aparatur, sehingga penanganan keluhan masyarakat menjadi lambat.
- 6) Sikap Apatis/Kurang Pemahaman Masyarakat: Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memahami persyaratan administrasi, sehingga pelayanan menjadi terhambat.
- 7) Keterbatasan Akses : Lokasi kantor kecamatan yang jauh atau sulit dijangkau bagi masyarakat desa terpencil.
- 8) Adanya refocusing berdampak pada pengurangan anggaran di setiap sub kegiatan belanja.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran. Berikut upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Terus meningkatkan pembenahan kinerja perangkat aparatur melalui evaluasi kinerja aparatur secara berkala sehingga kualitas pelayanan publik dapat selalu terpantau dan terawasi dengan baik.
2. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat dan aparatur Kecamatan dan Kelurahan tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis).
3. Alokasi Anggaran yang memadai.

Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

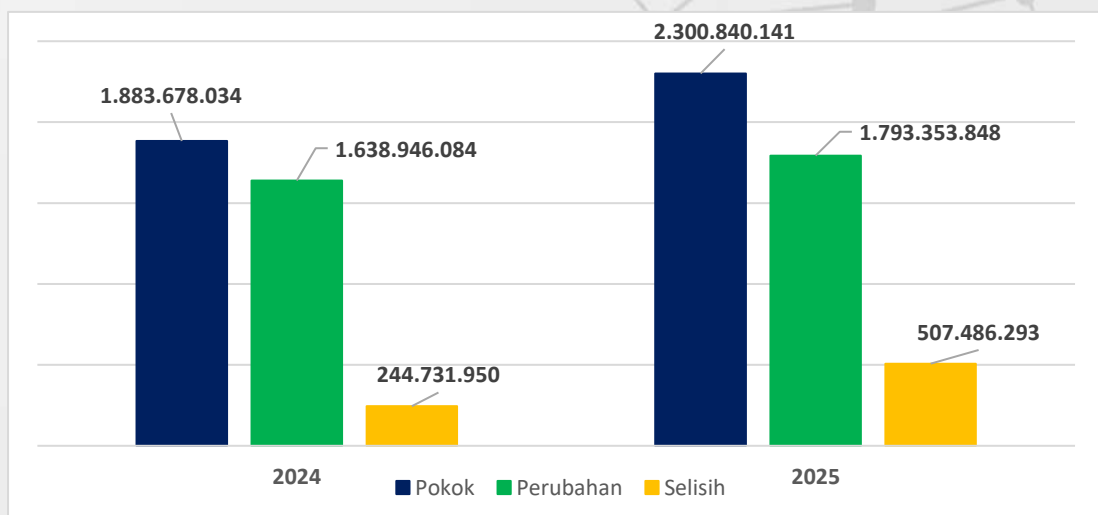
Untuk mencapai target sasaran tahun 2025, maka proses monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Matangnga dilakukan secara ketat. Monev dilaksanakan setiap Triwulan, untuk memastikan Program dan Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Program dan kegiatan dimaksud diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri 5 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, total anggaran sebesar Rp.1.540.507.848.-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, total anggaran sebesar Rp. 51.346.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 201.500.000,-

Tabel 3.8
Data Evaluasi Anggaran Program pada APBD Perubahan Tahun 2025

No.	Program	Sebelum (Rp)	Setelah (Rp)	Selisih (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.003.489.141	1.540.507.848	(462.981.293)
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	97.351.000	51.346.000	(46.005.000)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000	201.500.000	1.500.000
	Total Anggaran	2.300.840.141	1.793.353.848	(507.486.293)

Grafik 3.3
Data Evaluasi Anggaran Program pada APBD Perubahan



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : B (62,00)

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Matangnga Tahun 2025 pada sasaran Strategis 2, digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B (62,00)	B (60,00)	96,77%

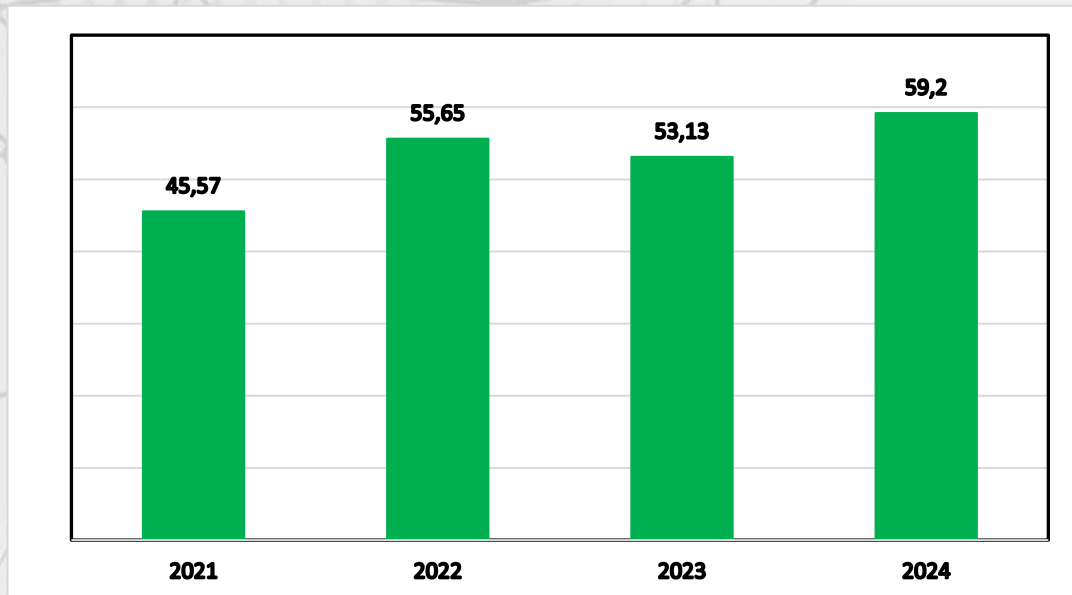
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan rewiuw oleh Inspektorat. Adapun capaian hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Matangnga, pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian hasil evaluasi SAKIP dari Tahun 2021 s/d 2024

No	Komponen Yang Dinilai	2021		2022		2023		2024	
		B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	22,25	30	22,70	30	19,15	30	18,90
b	Pengukuran Kinerja	25	14,06	25	16,25	25	8,75	30	13,80
c	Pelaporan Kinerja	15	3,42	15	7,46	15	7,11	15	9,00
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	2,84	10	4,49	10	4,13	25	17,50
e	Capaian Kinerja	20	3,00	20	4,75	20	14,00	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	45,57	100	55,65	100	53,13	100	59,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C		CC		CC		CC

a. Perbandingan Capaian Predikat SAKIP dari Tahun 2021 s/d 2024

Grafik 3.4
Perkembangan Implementasi SAKIP Tahun 2021-2024



Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Kecamatan Matangnga sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Kecamatan Matangnga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini turut mempengaruhi keterlibatan semua pihak pada internal Kecamatan, untuk meningkatkan nilai SAKIP dan bekerjasama untuk mencapai tujuan SAKIP. Capaian (60,00%) Predikat B dicapai tahun 2025 dipengaruhi komitmen pimpinan dalam penguatan koordinasi internal, kepada para pemangku SAKIP melalui rapat-rapat internal dengan memperhatikan capaian realisasi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan setiap triwulan, dan secara nyata berpengaruh terhadap perbaikan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan serta pengukuran kinerja.

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Matangnga Tahun 2024

Berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar nomor : 064.40/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025, Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Matangnga di tahun 2024 memperoleh nilai **59,20** atau memperoleh predikat rating "**CC**" (**Cukup Baik**), nilai tersebut terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dievaluasi pada Kecamatan Matangnga, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Data Indikator Predikat SAKIP Kantor Kecamatan Matangnga Tahun 2024
berdasarkan Review Penilaian LAKIP dari Inspektorat di Tahun 2025

No	Komponen yang di Nilai	Hasil Review LAKIP Tahun 2024 Yang di nilai di Tahun 2025	
		Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	18,90
b	Pengukuran Kinerja	30	13,80
c	Pelaporan Kinerja	15	9,00
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	59,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Kecamatan Matangnga telah memiliki dokumen perencanaan strategis berupa Renstra Tahun 2019-2024, Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian atau dilakukan perbaikan selanjutnya yakni, sebagai berikut :

- a). Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yakni menjelaskan secara memadai proses penyusunan;
- b). Pohon Kinerja belum menggambarkan sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan perangkat daerah dalam menghasilkan outcome yang diinginkan;
- c). Tidak terdapat persentase atas nilai Capaian Kinerja Utama pada dokumen LAKIP yang tersaji;
- d). Belum terdapat dokumen perbaikan atas dokumen perencanaan kinerja berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya secara detail dan terurai yang didukung dengan bukti dokumentasi yang valid.

2. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Matangnga telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat OPD, selain itu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan. Namun hasil pengukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk menyimpulkan kemajuan atau progres kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a). Pengukuran kinerja telah dilakukan namun belum disukung dengan Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja yang memuat : Dasar, Tujuan, Manfaat, Proses Bisnis, IKU, Pengukuran Kinerja dan pertanggung jawabannya, jadwal monev, serta SOP pengumpulan data yang diformalkan baik dalam bentuk SK/SE Kepala Perangkat Daerah;
- b). Belum terdapat Dokumen Profil IK (Indikator Kinerja) secara formal dengan minimal memuat narasi yang menjelaskan : Judul IK. Definisi Operasional/ Deskripsi IK, Cara Pengukuran/Formulasi, Sumber Data sebagai pendukung dan pengukuran kinerja, periode pengukuran, dan penanggungjawabnya.
- c). Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/Penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
- d). Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Perubahan strategi ini dapat disajikan pada revisi Renja sehingga diharapkan dengan strategi yang tepat akan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- e). Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. Perubahan kebijakan ini dapat disajikan pada revisi Renja, sehingga diharapkan dengan kebijakan yang tepat akan memberikan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- f). Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja, yakni perubahan aktivitas ini dapat disajikan pada revisi Renja dan revisi DIPA/DPA, sehingga diharapkan dengan aktivitas/kegiatan yang lebih fokus akan memberikan kemudahan dalam pengukuran realisasi kegiatan (output);
- g). Kecamatan Matangnga belum memanfaatkan dengan maksimal aplikasi SimKinerja Integrated untuk mengukur kinerja, terlihat pada aplikasi pada PK dan rencana pencapaian target untuk tahun 2024 masih kosong.

3. Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Kecamatan Matangnga telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan yang menggambarkan capaian-capaian kinerja outcome dan output yang telah dicapai samap dengan saat ini, namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- a). Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala;
- b). Capaian Kinerja yang diinformasikan dalam laporan kinerja bukan merupakan data yang valid dan tidak dapat diverifikasi lebih jauh berdasarkan sumber yang jelas;
- c). Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- d). Laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
- e). Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai namun belum didukung dengan Teknologi Informasi (Aplikasi). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja walaupun tidak secara signifikan.

Adapun rekomendasi Inspektorat terkait hasil Evaluasi AKIP Kantor Kecamatan Matangnga sebagai berikut :

- 1). Menyusun dokumen Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2). Menyusun Pohon Kinerja yang menggambarkan sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan outcome yang diinginkan dengan berdasar pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- 3). Membuat data/dokumen yang jelas dan dapat menggambarkan adanya hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
- 4). Menyajikan data persentase atas nilai capaian Kinerja Utama pada Dokumen LAKIP;

- 5). Menyajikan data Capaian Kinerja berdasarkan sumber data yang jelas dan valid serta menggunakan metode pengumpulan dan pengukuran data yang akurat.
- 6). Menyajikan dokumen perbaikan atas Dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya secara detail dan terurai yang didukung dengan bukti dokumentasi yang valid;
- 7). Menyusun dokumen Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja yang memuat : Dasar, Tujuan, Manfaat, Proses Bisnis, IKU, Pengukuran Kinerja dan pertanggung jawabannya, jadwal monev, serta SOP pengumpulan data yang diformalkan baik dalam bentuk SK/SE Kepala Perangkat Daerah;
- 8). Menyusun Dokumen Profil IK (Indikator Kinerja) secara formal dengan minimal memuat narasi yang menjelaskan : Judul IK. Definisi Operasional/ Deskripsi IK, Cara Pengukuran/Formulasi, Sumber Data sebagai pendukung dan pengukuran kinerja, periode pengukuran, dan penanggungjawabnya
- 9). Pengukuran Kinerja diharapkan dapat menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
- 10). Pengukuran kinerja diharapkan dapat mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Perubahan strategi ini dapat disajikan pada revisi Renja sehingga diharapkan dengan strategi yang tepat akan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- 11). Pengukuran kinerja diharapkan dapat mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. Perubahan kebijakan ini dapat disajikan pada revisi Renja, sehingga diharapkan dengan kebijakan yang tepat akan memberikan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- 12). Pengukuran kinerja diharapkan dapat mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja, yakni perubahan aktivitas ini dapat disajikan pada revisi Renja dan revisi DIPA/DPA, sehingga diharapkan dengan aktivitas/kegiatan yang lebih fokus akan memberikan kemudahan dalam pengukuran realisasi kegiatan (output);
- 13). Menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkala, dan selanjutnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- 14). Memanfaatkan aplikasi SimKinerja Integrated dengan maksimal untuk pengukuran kinerja dan sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja.

b. Analisis Keberhasilan / Kegagalan serta Solusi yang dilakukan

FAKTOR PENUNJANG	FAKTOR PENGHAMBAT	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya aplikasi e-SAKIP terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja • Pemahaman para pejabat struktural terkait penyusunan perjanjian kinerja masih kurang • Hasil pengukuran kinerja yang sudah ada, belum dijadikan acuan untuk mengevaluasi setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Organisasi dan Balitbangren dalam rangka penguatan pengelolaan data kinerja • Memaksimalkan aplikasi e-SAKIP yang sudah ada untuk melakukan pengukuran terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan

c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan, 4 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.200.000	2.200.000	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	515.000	515.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	755.000	755.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	415.000	415.000	100
Evaluasi Kinerja Perangkat	515.000	515.000	100

Gambar 3.7
Rapat Evaluasi Kinerja Kecamatan Matangnga Terkait Pencapaian Target Kinerja 2025

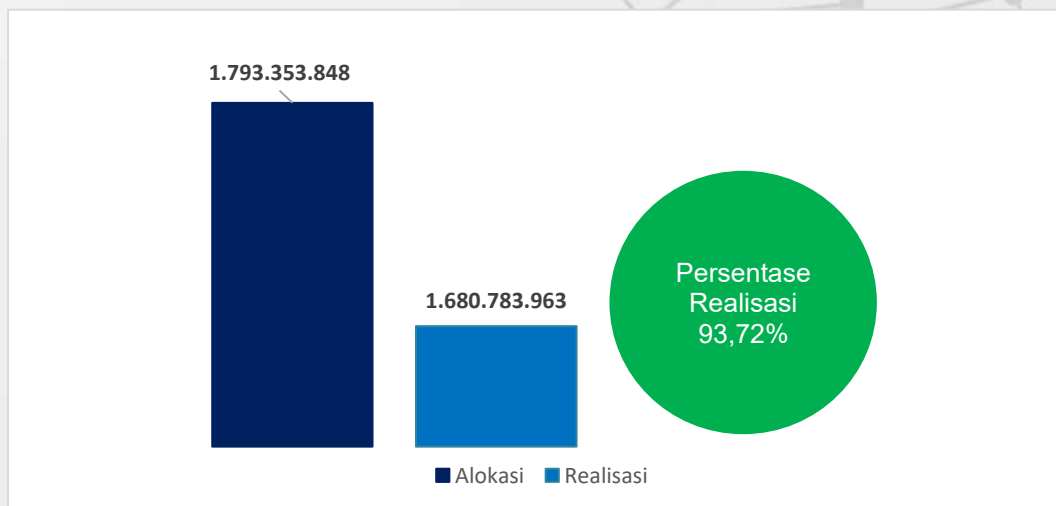


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.:

Grafik 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2024, maka dapat diamati melalui Tabel berikut

Tabel 3.13
Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	T	R	%	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	% EFISIENSI	KET
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Indikator : Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	83.50	82.55	98.86	252.846.000	252.846.000	100	0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
									Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah	62,00	60,00	96,77	1.540.507.848	1.427.937.963	92,69	7,30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH				97,81	1.793.353.848	1.680.783.963	93,72	6.27	

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Matangnga Tahun 2025 sebesar 97,81%, maka hal ini menunjukkan terjadinya efisiensi penggunaan dana sebesar 6,27%. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 93,72% telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 97,81%.

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Matangnga Tahun 2025, dilakukan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Mencermati tabel nilai efisiensi pada akuntabilitas kinerja di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya Kecamatan Matangnga tahun 2025 adalah **efisien**, karena seluruh realisasi kinerja **terrealisasi melebihi target (kinerja 97,81%)** dengan realisasi anggaran **93,72%**.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Matangnga sehingga efisiensi sumber daya tahun 2025 dapat dilakukan, antara lain :

- a) Komitmen pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik fisik maupun keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Terbangunnya pemahaman di seluruh level internal, terkait target kinerja yang harus dicapai, dengan menghasilkan kinerja berorientasi hasil yang berdaya guna.
- c) Adanya pembagian kerja yang nyata dan jelas di setiap unit kerja, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan direview secara berkala oleh pimpinan.

2. Analisis Keterkaitan Penggunaan Anggaran dengan Capaian Kinerja

Porsi belanja dalam APBD Kecamatan Matangnga tahun anggaran 2025 masih didominasi oleh belanja operasi, sementara belanja modal yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan jangka panjang relatif kecil. Penggunaan APBD tahun anggaran 2025 untuk belanja operasi sebesar 93,054% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 73,027%, dan belanja barang dan jasa sebesar 20,027%, sedangkan belanja modal sebesar 100% yang terdiri dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 100% (**Kelurahan Dana Bersumber dari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan**). Penggunaan APBD untuk belanja modal sangat penting dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan perencanaan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih menghadapi sejumlah permasalahan diantaranya yaitu efisiensi belanja pada program dan kegiatan (**Kecamatan**) terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan khususnya belanja Modal.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target sebesar 83,50 dengan realisasi sebesar 82,25 atau 98,50%, namun capaian tersebut tidak sebanding dengan besarnya penggunaan APBD, dimana seiring berjalan waktu terjadi pengurangan anggaran sampai 28,30%. Belanja APBD setelah perubahan tahun anggaran 2025 realisasi sebesar 93,72% atau senilai Rp.1.680.783.963 dengan efisiensi belanja sebesar 6,27% atau senilai Rp.112.569.885,- Realisasi belanja APBD sebesar 98,50% menunjukkan bahwa Kecamatan Matangnga

memiliki kinerja yang baik dalam hal penyerapan anggaran, tingginya realisasi belanja menandakan administrasi keuangan sudah berjalan relatif disiplin dan sesuai dengan target penyaluran dana namun capaian kinerja yang dihasilkan belum optimal.

Ketidakseimbangan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja menunjukkan bahwa belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, diperlukan transformasi dalam tata kelola APBD agar tidak hanya fokus pada tinggi rendahnya penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak nyata terhadap pencapaian target kinerja dan kesejahteraan Masyarakat.

Adanya pengurangan anggaran belanja sebesar 28,30% mencerminkan bahwa tidak seluruh anggaran yang dialokasikan digunakan untuk mencapai target kinerja. Pengurangan ini pada satu sisi dapat dipandang sebagai indikator positif karena menunjukkan adanya penghematan dalam pelaksanaan program, seperti melalui proses pengadaan barang dan jasa yang lebih kompetitif atau pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berhasil menghindari pemborosan sekaligus menjaga disiplin fiskal. Dalam konteks value for money, pengurangan anggaran bukan hanya sekadar penghematan, tetapi harus tetap menjamin tercapainya efektivitas dan manfaat program bagi Masyarakat.

Analisis penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan keterkaitannya dengan capaian kinerja menunjukkan bahwa pelayanan publik secara umum telah berjalan dengan baik, didukung oleh prinsip perencanaan berbasis kinerja. Namun, evaluasi juga menyoroti perlunya perbaikan signifikan pada beberapa aspek krusial, terutama kecepatan pelayanan dan penyediaan informasi layanan kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Tahun 2025, di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Tahun 2025 merupakan tahun yang memberikan tantangan tersendiri bagi Kecamatan Matangnga dalam pencapaian target kinerja tahunan, maupun pencapaian target kinerja 5 tahunan. Keterbatasan anggaran menjadi persoalan klasik sehingga pencairan keuangan tidak dapat dilaksanakan 100% karena Kabupaten Polewali Mandar mengalami **defisit anggaran**. dan hal ini tak mampu dihindari mengingat pelaksanaan Program/ Kegiatan apapun itu tentu akan mampu di ukur keberhasilannya jika ditopang ketersediaan anggaran yg memadai. Namun dengan optimis, kerja keras dan kepatuhan capaian kinerja Kantor Kecamatan Matangnga Tahun 2025, secara keseluruhan dapat dinyatakan “**berhasil**”, Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Kantor Kecamatan Matangnga sebesar **97,81%** serta capaian kinerja/realisasi keuangan sebesar **104,13%** dari hasil perubahan anggaran Tahun 2025. Kondisi ini memperlihatkan Kantor Kecamatan Matangnga berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **6,27%**.

B. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN DI MASA DATANG

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung dengan indikator setingkat outcome. Untuk itu Kantor Kecamatan Matangnga akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Adapun langkah yang akan menjadi perencanaan di masa akan datang yang mendorong capaian kinerja Kantor Kecamatan Matangnga antara lain :

1. Mempertahankan dan berusaha untuk meningkatkan hasil capaian yang telah diperoleh;
2. Memperjelas kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan yang belum jelas statusnya dan legitimasinya, karena baik adanya regulasi / kebijakan baru ataupun tidak, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi tumpang tindih;
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) intensif (pendampingan langsung/workshop) bagi aparatur kecamatan terkait penyusunan dokumen SAKIP yang berkualitas (BB), bukan hanya pemahaman teori;
4. Memastikan rencana aksi kegiatan di kecamatan selaras dengan analisis kebutuhan nyata di masyarakat, didukung oleh data dukung yang memadai;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui strategi dua arah: menghapus aset rusak berat yang membebani anggaran pemeliharaan serta mengajukan pengadaan sarpras baru yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (IKM);
6. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SAKIP dalam menyusun laporan kinerja agar penyajian data lebih terstruktur, efisien, dan transparan;
5. Meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Desa terkait percepatan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pelosok.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.



CAMAT MATANGNGA

ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19740819 200801 1 005

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Tahun 2025
- Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025
- Matriks Cascading Kinerja Tahun 2025
- Laporan Monev Rencana Aksi Tahun 2025
- Laporan Monev Renja Triwulan.I Tahun 2025
- Laporan Monev Renja Triwulan.II Tahun 2025
- Laporan Monev Renja Triwulan.III Tahun 2025
- Laporan Monev Renja Triwulan.IV Tahun 2025
- Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN MATANGNGA

Jalan Poros Matangnga No.01 Kode Pos 91350
email : kecamatan.matangnga@gmail.com..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANDI SYARIF, S.IP**

Jabatan : Camat Matangnga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMSUL MAHMUD**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami, kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
BUPATI POLEWALI MANDAR

SAMSUL MAHMUD

Pihak Pertama
CAMAT MATANGNGA,

ANDI SYARIF, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP : 19740819 200801 1 005



**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MATANGNGA
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	82,50 B	90,00 B	90,00 B
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	59.25 CC	62,00 B	62,00 B

NO	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.620.104.386	Rp. 1.540.507.848	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 42.015.000	Rp. 51.346.000	
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan kelurahan	Rp. 201.500.000	Rp. 201.500.000	
	JUMLAH	Rp. 1.863.619.386	Rp. 1.793.353.848	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

SAMSUL MAHMUD

Pihak Pertama
Camat Matangnga,



ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19740819 200801 1 005

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MATANGNGA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan

Adapun dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan diukur untuk mengetahui Kinerja Pelayanan di Kecamatan Matangnga	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan akan berdampak secara signifikan terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan	Untuk mengetahui Capaian Kinerja layanan maka dilakukan Pengukuran Kinerja	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Baik	Penentuan target kinerja tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2024 yang mencapai predikat baik, Realisasi ini memotivasi untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkannya lebih baik

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah diukur untuk mengetahui Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Predikat SAKIP Perangkat Daerah akan berdampak secara signifikan terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Untuk mengetahui Predikat SAKIP Perangkat Daerah maka dilakukan penilaian performa kinerja yaitu dengan melakukan penilaian terhadap 5 komponen utama yaitu : 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Internal (10%) 5. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (20%)	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	Penentuan target kinerja tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2024 yang mencapai predikat CC, . Realisasi ini memotivasi untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkannya lebih baik



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN MATANGNGA

Jalan Poros Matangnga No.01 Kode Pos 91350
email : kecamatan.matangnga@gmail.com..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ASNAWI, S.IP**

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI SYARIF, S.IP**

Jabatan : Camat Matangnga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Sekretaris Camat,

MUHAMMAD ASNAWI, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19750315 200801 1 020



Pihak Kedua
Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19740819 200801 1 005

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS CAMAT
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	95.82 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Meningkatnya kepuasan terhadap layanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	(82.50) Sangat Baik	(90) Sangat Baik	(90) Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan pemberdayaan di desa dan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terlaksana sesuai konsep pemberdayaan masyarakat	100 Persen	100 Persen	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.354.584.116	Rp. 1.279.318.578	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 47.203.200	Rp. 35.992.800	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 0	Rp. 0	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 179.523.100	Rp. 179.523.100	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 36.593.970	Rp. 43.473.370	
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 42.015.000	Rp. 51.346.000	

10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 201.500.000	Rp. 201.500.000	
	JUMLAH	Rp. 1.863.619.386	Rp. 1.793.353.848	



Pihak Kedua
Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP : 19740819 200801 1 005

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Sekretaris Camat,

MUHAMMAD ASNAWI, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP : 19750315 200801 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN MATANGNGA

Jalan Poros Matangnga No.01 Kode Pos 91350
email : kecamatan.matangnga@gmail.com..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ABD. RAHMAN, S.IP**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD ASNAWI, S.IP**
Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.



Pihak Kedua
Sekretaris Camat,

MUHAMMAD ASNAWI, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP : 19750315 200801 1 020

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan
Kepegawaian,

ABD. RAHMAN, S.IP
Pangkat : Penata
NIP : 19721030 200701 1 015

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	11 Paket	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	4 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19 Paket	13 Paket	13 Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253 Laporan	102 Laporan	102 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2200 Laporan	100 Laporan	100 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	2 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 595.000	Rp. 595.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 10.395.000	Rp. 10.395.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 5.063.000	Rp. 5.063.000	
4	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 9.906.000	Rp. 9.906.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 21.244.200	Rp. 10.033.800	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 850.000	Rp. 850.000	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 5.073.100	Rp. 5.073.100	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 173.600.000	Rp. 173.600.000	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 35.173.970	Rp. 42.053.370	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.420.000	Rp. 1.420.000	
	JUMLAH	Rp. 263.320.270	Rp. 258.989.270	



Pihak Kedua
Sekretaris Camat,

MUHAMMAD ASNAWI, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19750315 200801 1 020

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian

ABD. RAHMAN, S.IP

Pangkat : Penata

NIP : 19721030 200701 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN MATANGNGA

Jalan Poros Matangnga No.01 Kode Pos 91350
email : kecamatan.matangnga@gmail.com..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ABD. RAHMAN, S.IP**
Jabatan : Plt. Kasubag Keuangan Perencanaan dan Pelaporan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD ASNAWI, S.IP**
Jabatan : Sekretaris Camat
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.



Pihak Kedua
Sekretaris Camat,

MUHAMMAD ASNAWI, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP : 19750315 200801 1 020

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Plt. Kasubag Keuangan Perencanaan
Dan Pelaporan,

ABD. RAHMAN, S.IP
Pangkat : Penata
NIP : 19721030 200701 1 015

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	15 Orang	15 Orang
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 515.000	Rp. 515.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 755.000	Rp. 755.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 415.000	Rp. 415.000	

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	515.000	Rp	515.000	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1.353.884.116	Rp.	1.279.318.578	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	700.000	Rp	700.000	
JUMLAH		Rp.	1.356.784.116	Rp.	1.282.218.578	

Polewali, Oktober 2025



Pihak Kedua
Sekretaris Camat,

MUHAMMAD ASNAWI, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19750315 200801 1 020

Pihak Pertama
Plt. Kasubag Keuangan Perencanaan
Dan Pelaporan,

ABD. RAHMAN, S.IP

Pangkat : Penata

NIP : 19721030 200701 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN MATANGNGA

Jalan Poros Matangnga No.01 Kode Pos 91350
email : kecamatan.matangnga@gmail.com..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **FITRIYAH, SE**
Jabatan : Kasi Tata pemerintahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI SYARIF, S.IP**
Jabatan : Camat Matangnga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasi Tata Pemerintahan,

FITRIYAH, SE

Pangkat : Penata

NIP : 19820827 201409 2 002



Pihak Kedua
Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19740819 200801 1 005

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 14.650.000	Rp. 18.981.000	
	JUMLAH	Rp. 14.650.000	Rp. 18.981.000	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasi Tata Pemerintahan,



FITRIYAH, SE

Pangkat : Penata

NIP : 19820827 201409 2 002



Pihak Kedua
Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19740819 200801 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN MATANGNGA

Jalan Poros Matangnga No.01 Kode Pos 91350
email : kecamatan.matangnga@gmail.com..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **KHOMENI, S.IP. MM.**
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI SYARIF, S.IP**
Jabatan : Camat Matangnga
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025



Pihak Kedua
Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP
Rangkat : Pembina
NIP : 19740819 200801 1 005

Pihak Pertama
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa,

KHOMENI, S.IP. MM.
Pangkat : Pembina
NIP : 19810717 200801 1 012

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan di Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 0	Rp. 0	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 28.750.000	Rp. 28.750.000	
	JUMLAH	Rp. 28.750.000	Rp. 28.750.000	

Polewali, Oktober 2025



ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19740819 200801 1 005

Pihak Pertama
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa,

KHOMENI, S.IP. MM.

Pangkat : Pembina

NIP : 19810717 200801 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN MATANGNGA

Jalan Poros Matangnga No.01 Kode Pos 91350
email : kecamatan.matangnga@gmail.com..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **IKRANUR. AM, S.Sos**
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI SYARIF, S.IP**
Jabatan : Camat Matangnga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum.

IKRANUR. AM, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830313 200502 1 004



Pihak Kedua
Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP : 19740819 200801 1 005

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 12.550.000	Rp. 12.550.000	
	JUMLAH	Rp. 12.550.000	Rp. 12.550.000	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,



Pihak Kedua
Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19740819 200801 1 005

IKRANUR. AM, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19830313 200502 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN MATANGNGA

Jalan Poros Matangnga No.01 Kode Pos 91350
email : kecamatan.matangnga@gmail.com..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DARMAWAN, S.Sos**
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial Pendidikan dan Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI SYARIF, S.IP**
Jabatan : Camat Matangnga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasi Kesejahteraan Sosial
Pendidikan dan Kesehatan,

DARMAWAN, S.IP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19810608 200604 1 021



Pihak Kedua
Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP : 19740819 200801 1 005

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 14.815.000	Rp. 19.815.000	
	JUMLAH	Rp. 14.815.000	Rp. 19.815.000	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
 Kasi Kesejahteraan Sosial
 Pendidikan dan Kesehatan

DARMAWAN, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19810608 200604 1 021



Pihak Kedua
 Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19740819 200801 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN MATANGNGA

Jalan Poros Matangnga No.01 Kode Pos 91350
email : kecamatan.matangnga@gmail.com..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD BACHTIAR, S.Hi**
Jabatan : Kasi Perekonomian Pembangunan dan Pendapatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ANDI SYARIF, S.IP**
Jabatan : Camat Matangnga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025



Pihak Kedua
Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP
Pangkat : Pembina
NIP : 19740819 200801 1 005

Pihak Pertama
Kasi Perekonomian Pembangunan
Dan Pendapatan,

MUHAMMAD BACHTIAR, S.Hi
Pangkat : Penata
NIP : 19740524 200604 1 015

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan di Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 172.750.000	Rp. 172.750.000	
	JUMLAH	Rp. 172.750.000	Rp. 172.750.000	

Polewali, Oktober 2025



Pihak Kedua
Camat Matangnga,

ANDI SYARIF, S.IP

Rangkat : Pembina

NIP : 19740819 200801 1 005

Pihak Pertama
Kasi Perekonomian Pembangunan
Dan Pendapatan

MUHAMMAD BACHTIAR, S.Hi

Pangkat : Penata

NIP : 19740524 200604 1 015

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian
	<i>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas</i>	<i>Indeks kepuasan masyarakat</i>	Angka	83,50	82,25	98,50 %
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	90,00	93,72	104,13 %
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Persen	62,00	60,00	96,77%

Matangnga, 06 Januari 2025

CAMAT MATANGNGA

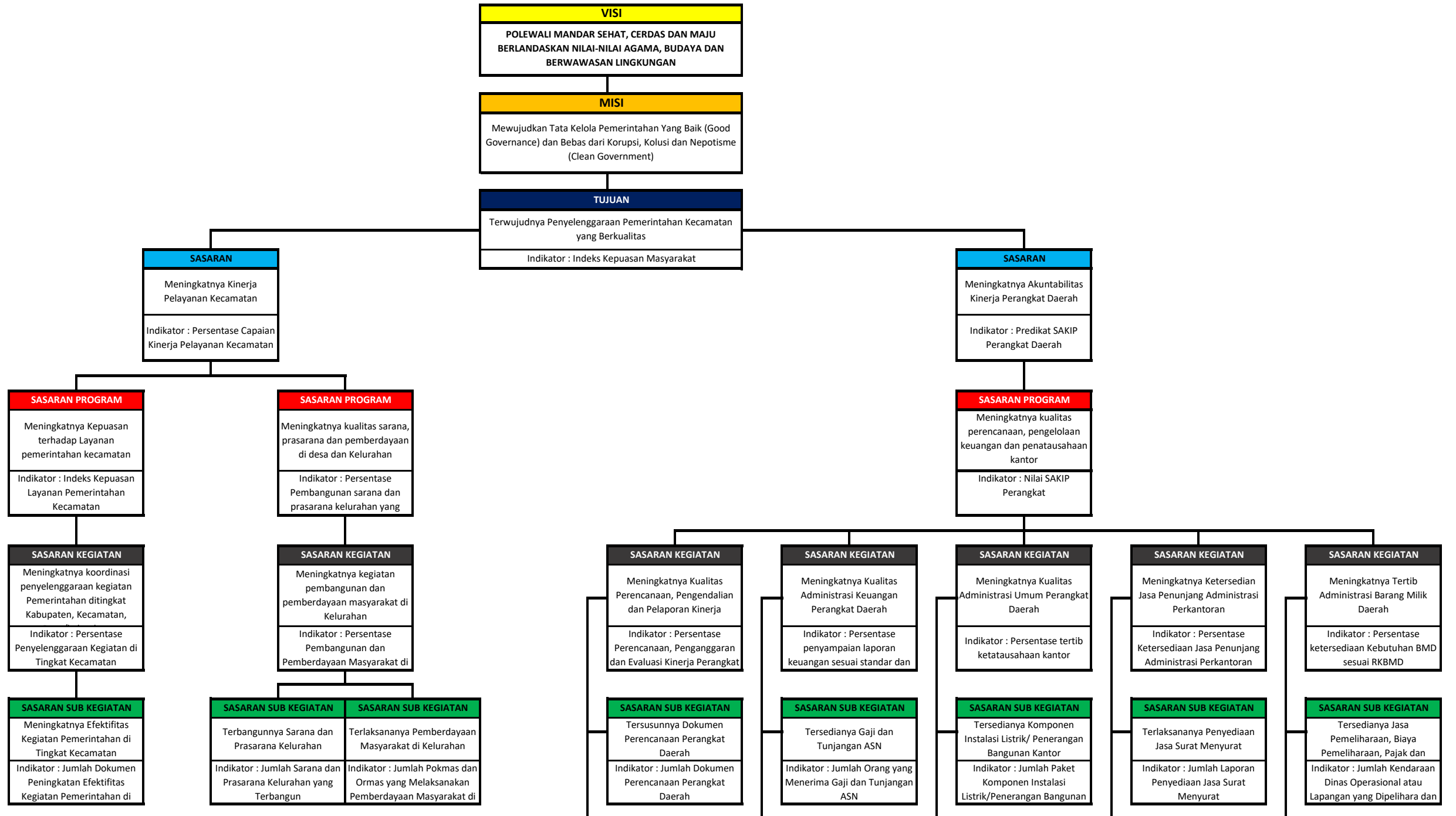


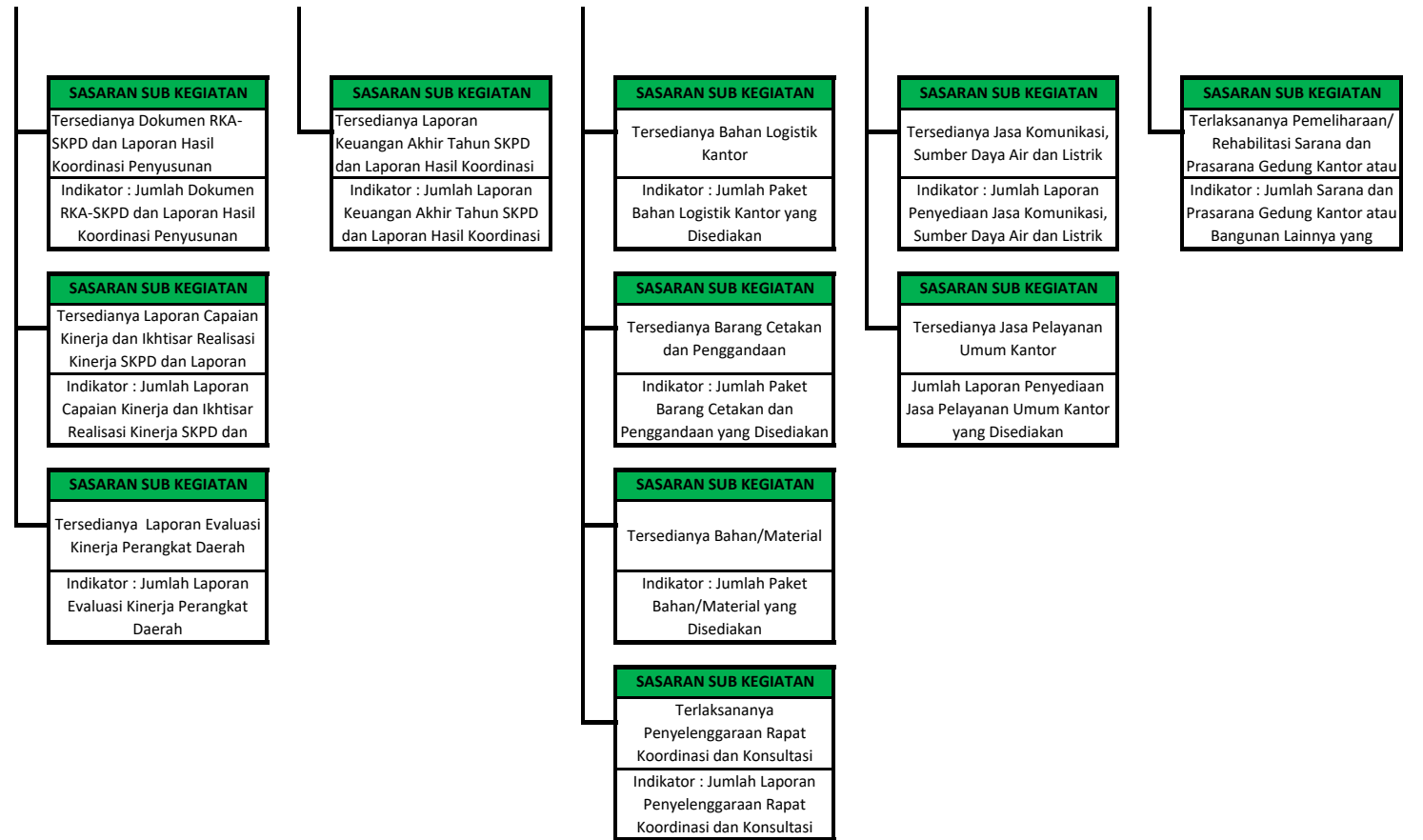
ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 19740819 200801 1 005

POHON KINERJA KECAMATAN MATANGNGA TAHUN 2025





MATRIKS CASCADING KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN MATANGNGA

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran Program	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan
VISI : POLEWALI MANDAR SEHAT, CERDAS DAN MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN																
MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (CLEAN GOVERNMENT)																
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat											
						Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan									
								Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
											Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
														Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
								Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan pemberdayaan di desa dan Kelurahan	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terlaksana sesuai konsep pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
											Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Persentase Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan			
														Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
														Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

PERJANJIAN KINERJA
BUPATI

PERJANJIAN KINERJA
CAMAT

PERJANJIAN KINERJA
UNIT ESELON III

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV/
JAFUNG

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP															
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah												
							Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota									
										Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
													Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
													Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
													Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
													Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat			
										Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
													Terpenuhinya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
													Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			

										Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
													Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
													Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
													Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
													Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material
													Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
										Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai standar dan prosedur	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
													Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
													Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
													Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
										Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKP-BMD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
													Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
													Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**RENCANA AKSI KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Tujuan / Sasaran	Rencana Aksi												Keterangan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target	Rp	Waktu Pelaksanaan Triwulan				Penanggung Jawab	
								I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Indeks kepuasan masyarakat	Angka	83,50	1.793.353.848	✓	✓	✓	✓	Camat	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan				Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase	90,00	252.846.000	✓	✓	✓	✓	Camat	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan	Persentase	100	51.346.000	✓	✓	✓	✓	Camat	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100	51.346.000	✓	✓	✓	✓	Sekretaris Camat	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	51.346.000	✓	✓	✓	✓	Semua Seksi	Fasilitasi Kegiatan HUT-RI, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Tp.PKK Dikecamatan

Tujuan / Sasaran	Rencana Aksi												
	Program	Kegiatan	Program	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target	Rp	Waktu Pelaksanaan Triwulan				Penanggung Jawab	Keterangan
								I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	Pesentase	100	201.500.000		✓	✓	✓	Camat	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	Persentase	100	201.500.000		✓	✓	✓	Sekretaris Camat	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	172.750.000		✓	✓	✓	Kepala Seksi Ekbang dan Pendapatan Lurah	Pembangunan Jalan Tani dan Rabat Beton
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	28.750.000		✓	✓	✓	Kepala Seksi PMD Lurah	Fasilitasi Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	1.540.507.848	✓	✓	✓	✓	Camat	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B	1.540.507.848	✓	✓	✓	✓	Camat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	Persentase	100	2.200.000	✓	✓	✓	✓	Sekretaris Camat	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	515.000	✓	✓	✓		Kasubag Keuangan Perencanaan dan pelaporan	Penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan

Tujuan / Sasaran	Rencana Aksi												
	Program	Kegiatan	Program	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target	Rp	Waktu Pelaksanaan Triwulan				Penanggung Jawab	Keterangan
								I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen	2	755.000	√				Kasubag Keuangan Perencanaan dan pelaporan	Penyusunan Dokumen RKA dan DPA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	415.000	√	√	√	√	Kasubag Keuangan Perencanaan dan pelaporan	Laporan Capaian Kinerja
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	515.000	√	√	√	√	Kasubag Keuangan Perencanaan dan pelaporan	Laporan Capaian Kinerja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Persentase	100	1.279.318.578	√	√	√	√	Sekretaris Camat	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	15	1.278.618.578	√	√	√	√	Kasubag Keuangan Perencanaan dan pelaporan	Laporan Gaji dan TPP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	700.000	√				Kasubag Keuangan Perencanaan dan pelaporan	Laporan Keuangan Akhir Tahun
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	Persentase	100	35.992.800	√	√	√	√	Sekretaris Camat	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	595.000	√	√	√	√	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan / Sasaran	Rencana Aksi											Keterangan	
	Program	Kegiatan	Program	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target	Rp	Waktu Pelaksanaan Triwulan					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	10.395.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.063.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	13	9.906.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	10.033.800	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai standar dan prosedur	Persentase	100	179.523.100	✓	✓	✓	✓	Sekretaris Camat	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	850.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5.073.100	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	173.600.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan / Sasaran	Rencana Aksi												
	Program	Kegiatan	Program	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target	Rp	Waktu Pelaksanaan Triwulan				Penanggung Jawab	Keterangan
								I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD	Persentase	100	43.473.370	✓	✓	✓	✓	Sekretaris Camat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	42.053.370	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	1.420.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Matangnga, 06 Januari 2025

CAMAT MATANGNGA,



ANDI SYARIF, S.IP
Pangkat : Pembina

NIP : 197408192008011005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN MATANGNGA
TAHUN 2025**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	Ket
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN MATANGNGA	1.468.613.778	1.365.368.963	103.244.815	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.417.267.778	1.314.022.963	103.244.815	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.200.000	2.200.000	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	515.000	515.000	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	755.000	755.000	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	415.000	415.000	-	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	515.000	515.000	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.279.318.578	1.184.172.963	95.145.615	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.278.618.578	1.183.472.963	95.145.615	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000	700.000	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.102.800	21.639.000	2.463.800	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	595.000	595.000	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.625.000	5.625.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.700.000	3.700.000	-	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.819.000	5.819.000	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.363.800	5.900.000	2.463.800	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.231.900	81.671.000	5.560.900	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850.000	850.000	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.781.900	721.000	3.060.900	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.600.000	80.100.000	2.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.414.500	24.340.000	74.500	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.994.500	22.920.000	74.500	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.420.000	1.420.000	-	
7.01.02	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.346.000	51.346.000	-	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.346.000	51.346.000	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.346.000	51.346.000	-	
	KELURAHAN MATANGNGA	324.740.070	315.415.000	9.325.070	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	123.240.070	113.915.000	9.325.070	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.890.000	11.625.000	265.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.770.000	4.770.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.363.000	1.098.000	265.000	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	4.087.000	4.087.000	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.670.000	1.670.000	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.291.200	91.000.000	1.291.200	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.291.200	-	1.291.200	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.000.000	91.000.000	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.058.870	11.290.000	7.768.870	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.058.870	11.290.000	7.768.870	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.500.000	201.500.000	-	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	201.500.000	201.500.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	172.750.000	172.750.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28.750.000	28.750.000	-	
		1.793.353.848	1.680.783.963	112.569.885	

Matangnga, 31 Desember 2025

SAMAT MATANGNGA



ANDI SYARIF, S.I.P
 Pangkat : Pembina
 NIP : 197408192008011005

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		15
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
	KECAMATAN MATANGNGA			1.943.374.941													
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks	Sangat Baik	1.846.023.941	17%	315.317.583	0%	-	0%	-	0%	-	17%	315.317.583	17,08	17,08	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	5.330.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.095.000	0%		0%		0%		0%		0%	-	-	-	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2.125.000	0%		0%		0%		0%		0%	-	-	-	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	1.035.000	0%		0%		0%		0%		0%	-	-	-	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.075.000	0%		0%		0%		0%		0%	-	-	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	1.614.234.041	19%	303.517.583	0%	-	0%	-	0%	-	19%	303.517.583	18,80	18,80	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1.612.993.841	19%	303.517.583	0%		0%		0%		19%	303.517.583	18,82	18,82	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.240.200	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	78.085.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.545.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	

3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.450.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.425.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	
3.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13 Paket	7.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	54.665.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	40.869.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00	-
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	40.869.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	-	-	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	77.200.900	15%	11.800.000	0%	-	0%	-	0%	-	15%	11.800.000	15,28	15,28
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.619.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.781.900	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.800.000	17%	11.800.000	0%	-	0%	-	0%	-	17%	11.800.000	16,67	16,67
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	100%	30.305.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	25.132.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.333.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2.840.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
II	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Sangat Baik	97.351.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 Kegiatan	96.356.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Desa/1 Kelurahan	9.700.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-

1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	86.656.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Urusan	995.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	995.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
KELURAHAN MATANGNGA				357.465.200												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks	Sangat Baik	157.465.200	2%	3.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	2%	3.000.000	1,91	1,91
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	2.059.800	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	878.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.181.800	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	33.616.200	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
2.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.120.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.276.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
2.3	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket	5.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	20.220.200	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	25.266.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00	-
3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	25.266.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	79.291.200	4%	3.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	4%	3.000.000	3,78	3,78

4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.291.200	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	78.000.000	4%	3.000.000	0%	-	0%	0%	0%	4%	3.000.000	3,85	3,85	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	100%	17.232.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	17.232.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	100%	200.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	100%	200.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	
1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	172.750.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	
1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	27.250.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	
JUMLAH			100%	2.300.840.141	14%	318.317.583	0%	-	0%	-	0%	-	14%	318.317.583	13,83	13,83
Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan														13,83	13,83	
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Matangnga, 10 April 2025

SAMAT MATANGNGA



ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 197408192008011005

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		15
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
	KECAMATAN MATANGNGA			1.538.859.216													
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks	Sangat Baik	1.496.844.216	21%	315.317.583	22%	323.811.511	0%	-	0%	-	43%	639.129.094	42,70	42,70	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	2.200.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	515.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	755.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	415.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	515.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	1.354.584.116	22%	303.517.583	23%	306.826.511	0%	-	0%	-	45%	610.344.094	45,06	45,06	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1.353.884.116	22%	303.517.583	23%	306.826.511	0%	-	0%	-	45%	610.344.094	45,08	45,08	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	700.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	33.256.200	0%	-	12%	4.016.000	0%	-	0%	-	12%	4.016.000	12,08	12,08	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	595.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	

3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.625.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.700.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
3.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13 Paket	5.819.000	0%	-	17%	996.000	0%	-	0%	-	17%	996.000	17,12	17,12
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	17.517.200	0%	-	17%	3.020.000	0%	-	0%	-	17%	3.020.000	17,24	17,24
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	87.231.900	14%	11.800.000	14%	12.109.000	0%	-	0%	-	27%	23.909.000	27,41	27,41
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	850.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.781.900	0%	-	8%	309.000	0%	-	0%	-	8%	309.000	8,17	8,17
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.600.000	14%	11.800.000	14%	11.800.000	0%	-	0%	-	29%	23.600.000	28,57	28,57
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	100%	19.572.000	0%	-	4%	860.000	0%	-	0%	-	4%	860.000	4,39	4,39
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	18.152.000	0%	-	5%	860.000	0%	-	0%	-	5%	860.000	4,74	4,74
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	1.420.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
II	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Sangat Baik	42.015.000	0%	-	11%	4.815.000	0%	-	0%	-	11%	4.815.000	11,46	11,46
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 Kegiatan	42.015.000	0%	-	11%	4.815.000	0%	-	0%	-	11%	4.815.000	11,46	11,46

3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	92.291.200	3%	3.000.000	25%	23.000.000	0%	-	0%	-	28%	26.000.000	28,17	28,17
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.291.200	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.000.000	3%	3.000.000	25%	23.000.000	0%	-	0%	-	29%	26.000.000	28,57	28,57
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPMBMD	100%	17.021.970	0%	-	5%	800.000	0%	-	0%	-	5%	800.000	4,70	4,70
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	17.021.970	0%	-	5%	800.000	0%	-	0%	-	5%	800.000	4,70	4,70
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	100%	201.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	100%	201.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	172.750.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	28.750.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
JUMLAH			100%	1.863.619.386	17%	318.317.583	19%	354.626.511	0%	-	0%	-	36%	672.944.094	36,11	36,11
Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan															36,11	36,11
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah



Matangnga, 07 Juli 2025

KAMAT MATANGNGA

ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 197408192008011005

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN III TAHUN 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		15
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
	KECAMATAN MATANGNGA			1.538.859.216		315.317.583		328.626.511		328.675.935							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks	Sangat Baik	1.496.844.216	21%	315.317.583	22%	323.811.511	20%	301.475.935	0%	-	63%	940.605.029	62,84	62,84	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	2.200.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	515.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	755.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	415.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	515.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	1.354.584.116	22%	303.517.583	23%	306.826.511	19%	261.975.935	0%	-	64%	872.320.029	64,40	64,40	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1.353.884.116	22%	303.517.583	23%	306.826.511	19%	261.975.935	0%	-	64%	872.320.029	64,43	64,43	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	700.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	33.256.200	0%	-	12%	4.016.000	14%	4.550.000	0%	-	26%	8.566.000	25,76	25,76	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	595.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	

3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.625.000	0%	-	0%	-	42%	2.340.000	0%	-	42%	2.340.000	41,60	41,60
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.700.000	0%	-	0%	-	19%	696.000	0%	-	19%	696.000	18,81	18,81
3.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13 Paket	5.819.000	0%	-	17%	996.000	26%	1.514.000	0%	-	43%	2.510.000	43,13	43,13
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	17.517.200	0%	-	17%	3.020.000	0%	-	0%	-	17%	3.020.000	17,24	17,24
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	87.231.900	14%	11.800.000	14%	12.109.000	34%	29.500.000	0%	-	61%	53.409.000	61,23	61,23
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	850.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.781.900	0%	-	8%	309.000	0%	-	0%	-	8%	309.000	8,17	8,17
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.600.000	14%	11.800.000	14%	11.800.000	36%	29.500.000	0%	-	64%	53.100.000	64,29	64,29
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPMBD	100%	19.572.000	0%	-	4%	860.000	28%	5.450.000	0%	-	32%	6.310.000	32,24	32,24
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	18.152.000	0%	-	5%	860.000	30%	5.450.000	0%	-	35%	6.310.000	34,76	34,76
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	1.420.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
II	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Sangat Baik	42.015.000	0%	-	11%	4.815.000	65%	27.200.000	0%	-	76%	32.015.000	76,20	76,20
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 Kegiatan	42.015.000	0%	-	11%	4.815.000	65%	27.200.000	0%	-	76%	32.015.000	76,20	76,20

3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	92.291.200	3%	3.000.000	25%	23.000.000	35%	32.500.000	0%	-	63%	58.500.000	63,39	63,39	
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.291.200	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.000.000	3%	3.000.000	25%	23.000.000	36%	32.500.000	0%	-	64%	58.500.000	64,29	64,29	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	100%	17.021.970	0%	-	5%	800.000	9%	1.600.000	0%	-	14%	2.400.000	14,10	14,10	
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	17.021.970	0%	-	5%	800.000	9%	1.600.000	0%	-	14%	2.400.000	14,10	14,10	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	100%	201.500.000	0%	-	0%	-	64%	128.750.000	0%	-	64%	128.750.000	63,90	63,90	
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	100%	201.500.000	0%	-	0%	-	64%	128.750.000	0%	-	64%	128.750.000	63,90	63,90	
1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	172.750.000	0%	-	0%	-	58%	100.000.000	0%	-	58%	100.000.000	57,89	57,89	
1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	28.750.000	0%	-	0%	-	100%	28.750.000	0%	-	100%	28.750.000	100,00	100,00	
JUMLAH			100%	1.863.619.386	17%	318.317.583	19%	354.626.511	26%	492.925.935	0%	-	63%	1.165.870.029	62,56	62,56	
Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan															62,56	62,56	
Predikat Kinerja															Rendah	Rendah	

Matangnga, 30 September 2025

CAMAT MATANGNGA



ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 197408192008011005

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		15
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
	KECAMATAN MATANGNGA			1.468.613.778		315.317.583		328.626.511		328.675.935		392.748.934		1.365.368.963			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks	Sangat Baik	1.417.267.778	22%	315.317.583	23%	323.811.511	21%	301.475.935	26%	373.417.934	93%	1.314.022.963	92,72	92,72	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	2.200.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2.200.000	100%	2.200.000	100,00	100,00	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	515.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	515.000	100%	515.000	100,00	100,00	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	755.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	755.000	100%	755.000	100,00	100,00	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	415.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	415.000	100%	415.000	100,00	100,00	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	515.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	515.000	100%	515.000	100,00	100,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	1.279.318.578	24%	303.517.583	24%	306.826.511	20%	261.975.935	24%	311.852.934	93%	1.184.172.963	92,56	92,56	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1.278.618.578	24%	303.517.583	24%	306.826.511	20%	261.975.935	24%	311.152.934	93%	1.183.472.963	92,56	92,56	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	700.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	700.000	100%	700.000	100,00	100,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	24.102.800	0%	-	17%	4.016.000	19%	4.550.000	54%	13.073.000	90%	21.639.000	89,78	89,78	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	595.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	595.000	100%	595.000	100,00	100,00	
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.625.000	0%	-	0%	-	42%	2.340.000	58%	3.285.000	100%	5.625.000	100,00	100,00	

1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	51.346.000	0%	-	9%	4.815.000	53%	27.200.000	38%	19.331.000	100%	51.346.000	100,00	100,00
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Urusan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
KELURAHAN MATANGNGA				324.740.070				3.000.000		26.000.000		164.250.000		122.165.000		315.415.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks	Sangat Baik	123.240.070	2%	3.000.000	21%	26.000.000	29%	35.500.000	40%	49.415.000	92%	113.915.000	92,43	92,43
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	11.890.000	0%	-	19%	2.200.000	12%	1.400.000	67%	8.025.000	98%	11.625.000	97,77	97,77
2.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.770.000	0%	-	0%	-	9%	420.000	91%	4.350.000	100%	4.770.000	100,00	100,00
2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.363.000	0%	-	14%	187.000	17%	235.000	50%	676.000	81%	1.098.000	80,56	80,56
2.3	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket	4.087.000	0%	-	24%	983.000	18%	745.000	58%	2.359.000	100%	4.087.000	100,00	100,00
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	1.670.000	0%	-	62%	1.030.000	0%	-	38%	640.000	100%	1.670.000	100,00	100,00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	92.291.200	3%	3.000.000	25%	23.000.000	35%	32.500.000	35%	32.500.000	99%	91.000.000	98,60	98,60

4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.291.200	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.000.000	3%	3.000.000	25%	23.000.000	36%	32.500.000	36%	32.500.000	100%	91.000.000	100,00	100,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	100%	19.058.870	0%	-	4%	800.000	8%	1.600.000	47%	8.890.000	59%	11.290.000	59,24	59,24	
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	19.058.870	0%	-	4%	800.000	8%	1.600.000	47%	8.890.000	59%	11.290.000	59,24	59,24	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	100%	201.500.000	0%	-	0%	-	64%	128.750.000	36%	72.750.000	100%	201.500.000	100,00	100,00	
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	100%	201.500.000	0%	-	0%	-	64%	128.750.000	36%	72.750.000	100%	201.500.000	100,00	100,00	
1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	172.750.000	0%	-	0%	-	58%	100.000.000	42%	72.750.000	100%	172.750.000	100,00	100,00	
1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	28.750.000	0%	-	0%	-	100%	28.750.000	0%	-	100%	28.750.000	100,00	100,00	
JUMLAH			100%	1.793.353.848	18%	318.317.583	20%	354.626.511	27%	492.925.935	29%	514.913.934	94%	1.680.783.963	93,72	93,72	
Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan															93,72	93,72	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Matangnga, 05 Januari 2026

CAMAT MATANGNGA



ANDI SYARIF, S.IP

Pangkat : Pembina

NIP : 197408192008011005



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jalan Pameran Lingk. Batu-batu Kelurahan Darma Kecamatan Polewali
Kabupaten Polewali Mandar Kode Pos 91314

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP
KECAMATAN MATANGNGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

NOMOR : 064.40/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2025
TANGGAL 13 JUNI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jl. Pameran, Lingk.Batu-Batu, Kelurahan Darma – Kecamatan Polewali
E-mail:inspektorat@polmankab.go.id Website:Inspektorat.Polmankab.go.id

Polewali, 13 Juni 2025

Nomor : 064.40/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP
Kecamatan Matangnga Tahun 2024

Yth. **Camat Matangnga**
di -
Matangnga

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 pada Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui Tingkat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome*, serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Hasil evaluasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diungkapkan.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa nilai sebesar **59,20** dengan predikat **“CC”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Cukup Baik”, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	18,90
b. Pengukuran Kinerja	30	13,80
c. Pelaporan Kinerja	15	9,00
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	59,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra Tahun 2019-2024), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen Rencana Aksi Tahun 2024, namun masih terdapat beberapa dokumen yang belum diformalkan atau ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya yakni, sebagai berikut :

- a. Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yakni yang menjelaskan secara memadai proses penyusunan; 1) dokumen Renstra, 2) dokumen Renja, 3) Dokumen Perjanjian Kinerja, 4) Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan 5) Rencana Aksi;
- b. Pohon kinerja belum menggambarkan sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan perangkat daerah dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan;
- c. Tidak terdapat persentase atas nilai capaian Kinerja Utama pada Dokumen LAKIP yang tersaji;
- d. Belum terdapat dokumen perbaikan atas Dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya secara detail dan terurai yang didukung dengan bukti dokumentasi yang valid;

2) Pengukuran Kinerja

Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat OPD, selain itu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan. Namun hasil pengukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun belum didukung dengan Pedoman Teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang memuat; Dasar, tujuan, manfaat, Proses Bisnis, IKU, Pengukuran Kinerja dan penanggungjawab-nya, jadwal monev, serta SOP Pengumpulan data yang diformalkan baik dalam bentuk SK/SE Kepala Perangkat Daerah;
- b. Belum terdapat Dokumen Profil IK (Indikator Kinerja) secara formal dengan minimal memuat narasi yang menjelaskan; Judul IK, Definisi Operasional/deskripsi IK, Cara Pengukuran / Formulasi, Sumber Data

sebagai pendukung dari pengukuran kinerja, periode pengukuran, dan Penanggungjawabnya.

- c. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
- d. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. Perubahan strategi ini dapat disajikan pada revisi Renja, sehingga diharapkan dengan strategi yang tepat akan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- e. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. Perubahan kebijakan ini dapat disajikan pada revisi Renja, sehingga diharapkan dengan kebijakan yang tepat akan memberikan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- f. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja, yakni Perubahan aktivitas ini dapat disajikan pada revisi Renja dan revisi DIPA/DPA, sehingga diharapkan dengan aktivitas/kegiatan yang lebih fokus akan memberikan kemudahan dalam pengukuran realisasi kegiatan (output).
- g. Kecamatan Matangnga belum memanfaatkan dengan maksimal aplikasi SimKinerja Integrated untuk mengukur kinerja, terlihat pada aplikasi pada PK dan rencana pencapaian target untuk tahun 2024 masih kosong.

3) Pelaporan Kinerja

Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan yang menggambarkan capaian-capaian kinerja *outcome* dan *output* penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini, namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala;

- b. Capaian Kinerja yang diinformasikan dalam Laporan Kinerja bukan merupakan data yang valid dan tidak dapat diverifikasi lebih jauh berdasarkan sumber yang jelas;
 - c. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - d. Laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
 - e. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- 4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai namun belum didukung dengan Teknologi Informasi (Aplikasi). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja walaupun tidak secara signifikan.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menyusun dokumen Pedoman Teknis perencanaan kinerja yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yakni yang menjelaskan secara memadai proses penyusunan; 1) dokumen Renstra, 2) dokumen Renja, 3) Dokumen Perjanjian Kinerja, 4) Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan 5) Rencana Aksi yang diformalkan baik dalam bentuk SK/SE Kepala Perangkat Daerah;
- 2) Menyusun Pohon kinerja yang menggambarkan sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan perangkat daerah dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan dengan berdasar pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- 3) Membuat data/ dokumen yang jelas dan dapat menggambarkan adanya hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- 4) Menyajikan data persentase atas nilai capaian Kinerja Utama pada Dokumen LAKIP;

- 5) Menyajikan data Capaian Kinerja berdasarkan sumber data yang jelas dan valid serta menggunakan metode pengumpulan dan pengukuran data yang akurat;
- 6) Menyajikan dokumen perbaikan atas Dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya secara detail dan terurai yang didukung dengan bukti dokumentasi yang valid;
- 7) Menyusun dokumen Pedoman Teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang memuat; Dasar, tujuan, manfaat, Proses Bisnis, IKU, Pengukuran Kinerja dan penanggungjawabnya, jadwal monev, serta SOP Pengumpulan data yang diformalkan baik dalam bentuk SK/SE Kepala Perangkat Daerah;
- 8) Menyusun Dokumen Profil IK (Indikator Kinerja) secara formal dengan minimal memuat narasi yang menjelaskan; Judul IK, Definisi Operasional/deskripsi IK, Cara Pengukuran / Formulasi, Sumber Data sebagai pendukung dari pengukuran kinerja, periode pengukuran, dan Penanggungjawabnya.
- 9) Pengukuran Kinerja diharapkan dapat menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
- 10) Pengukuran kinerja diharapkan dapat mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. Perubahan strategi ini dapat disajikan pada revisi Renja, sehingga diharapkan dengan strategi yang tepat akan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- 11) Pengukuran kinerja diharapkan dapat mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. Perubahan kebijakan ini dapat disajikan pada revisi Renja, sehingga diharapkan dengan kebijakan yang tepat akan memberikan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- 12) Pengukuran kinerja diharapkan dapat mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja, yakni Perubahan aktivitas ini dapat disajikan pada revisi Renja dan revisi DIPA/DPA, sehingga diharapkan dengan aktivitas/kegiatan yang lebih fokus akan memberikan kemudahan dalam pengukuran realisasi kegiatan (output);
- 13) Menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkala, dan selanjutnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;

- 14) Menyajikan informasi dalam dokumen Laporan Kinerja dengan cermat dan teliti termasuk informasi capaian Target yang telah terealisasi tahun sebelumnya;
- 15) Mengharapkan atensi Camat Matangnga untuk menindaklanjuti saran yang termuat dalam laporan kinerja sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan.
- 16) Memanfaatkan aplikasi SimKinerja Integrated dengan maksimal untuk mengukur kinerja dan sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja, kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Lingkungan Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih


INSPEKTUR,
H. AHMAD SAIFUDDIN, SH., MM
NIP 19651231 200003 1 084